

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP)
DI KABUPATEN PATI**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana-S2**

**Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi : Magister Manajemen Sumberdaya Pantai**



**Diajukan Oleh :
BUDIARTO
NIM. K4A000005**

Kepada :

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2004**

UPT-PUSTAK-INDIP

LEMBAR PENGESAHAN

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP)
DI KABUPATEN PATI**

Dipersiapkan dan disusun oleh

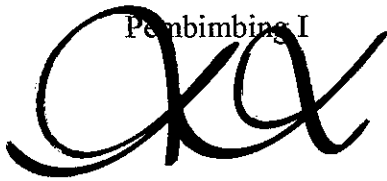
BUDIARTO

K4A000005

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

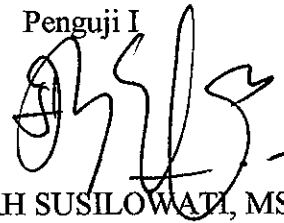
Pada Tanggal: 2 April 2004

Pembimbing I



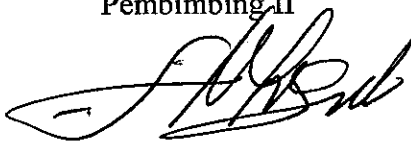
(Prof. Dr. Ir. SUTRISNO ANGGORO, MS.)

Penguji I



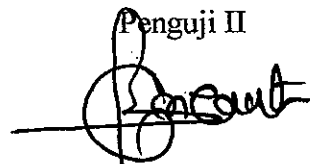
(Dr. INDAH SUSILOWATI, MS.)

Pembimbing II



(Dr. Ir. AZIS NUR BAMBANG, MS.)

Penguji II



(Dr. Ir. AGUNG SURYANTO, MS.)



Ketua Program Studi



(Dr. Ir. SUTRISNO ANGGORO, MS.)

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya.

Semua informasi dan pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, dengan ataupun dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dimana sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka dan isi tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya sebagai penulis

Semarang, April 2004

Penulis,


Budiarto

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	3142/T/MSDP/04
Tgl.	22 April 2004

ABSTRAK

Budiarto. NIM. K4A000005. **Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Pati.** (Sutrisno Anggoro dan Azis Nurbambang)

Jawa Tengah memiliki 2(dua) wilayah perairan laut yaitu : Perairan Utara (Laut Jawa) dan Perairan Selatan (Samudra Indonesia) yang mempunyai potensi besar bagi usaha penangkapan ikan dan budi daya, namun usaha tersebut telah melebihi potensi lestariannya terutama di perairan pantai utara (laut jawa). Akibat pemanfaatan potensi berlebihan dan adanya tekanan penduduk terhadap potensi sumberdaya alam tersebut telah menimbulkan permasalahan sosial ekonomi terutama bagi kehidupan nelayan yaitu : masalah kemiskinan.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan masyarakat pantai, maka pada tahun 2000 Pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan mencoba mengenalkan suatu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir melalui pengembangan ekonomi, penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat dan pendayagunaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Menentukan tingkat partisipasi masyarakat penerima dana program PEMP. 2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat partisipasi untuk masing-masing kelompok masyarakat penerima bantuan (nelayan, petani tambak dan pedagang ikan) pada setiap tahapan kegiatan adalah **tidak sama**. Secara keseluruhan diketahui bahwa tingkat partisipasi **tinggi** sebesar 48,33% diperoleh dari petani tambak 70,59%, pedagang ikan 54,55% dan nelayan 34,37%, sedangkan tingkat partisipasi **sedang** 51,67% diperoleh dari pedagang ikan 45,45%, nelayan 65,63% dan petani tambak 29,41%. Berdasarkan uji statistik regresi linier berganda faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi tingkat partisipasi yaitu faktor pendidikan, tanggungan keluarga dan pendapatan, sedang faktor : jenis pekerjaan tidak signifikan mempengaruhi tingkat partisipasi.

Kata Kunci : "Partisipasi, tahapan kegiatan, jenis pekerjaan dan program PEMP".

ABSTRACT

Budiarto. NIM. K4A000005. An Analysis of Community Participation on Economic Empowerment Program in Coastal Community of Pati Regency Central Java. (Sutrisno Anggoro and Azis Nurbambang)

Central Java is bordered by Java Sea in the North, and Indonesian Ocean in the South. It has a great potential for fish catching activity. The exploration of fish resource potential in the north coast of Central Java (Java Sea), whether for catching or cultivation have outweighed its preservation potential.

As a results of excess potential exploration and the high need of the community for this resource, there is a socio-economic problem especially for the fisherman living, namely poverty.

To solve the poverty of coastal community, then in 2000, Government through Fishery Affairs Department, tried to introduce Coastal Community Economic Empowerment (PEMP). The program has the objective to increase coastal community earning by development of economic, institutional strengthening, community participation enhancement, and sustainable resource exploration.

This study was aimed to: 1) Determine the participation rate the community which has received PEMP Program grant. 2) Analyze factors influencing participation rate.

The results shows that the participation rate of the group involved in the grant, including fisherman, fishpond farmer and fish trader, is not similar. In every stage activity, their participation is different from a group to another. The overall high participation valued 48.33%, 70,59% is from fishpond farmer, 54,55% from fish trader and 34,45% from fisherman, middle participation rate valued 51.57%, 45,45% is from fish trader, 65,63% from fisherman and 29,41 from fishpond farmer. The results of multiple linear statistic test show that factors which significantly influence the rate of participation influence education, the number of dependent family member, and earning : whereas, kind of jobs does not significantly influence the participation rate.

Keywords : "Participation, activities stage, kind of job and PEMP program".

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, karena atas Rahmat dan Hidayah serta Rindho Nya karya ilmiah ini telah dapat kami selesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi tugas akhir pada Program Pascasarjana Program Studi Manajemen Sumberdaya Pantai Universitas Diponegoro Semarang sebagai salah satu persyaratan guna mencapai derajat sarjana S-2.

Tesis yang berjudul “ Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Pati” telah diseminarkan dan mendapat tanggapan, arahan, koreksi dan penyempurnaan, baik dari Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji serta peserta seminar.

Selanjutnya pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.Dr.Ir. Sutrisno Anggoro,MS. sebagai Dosen Pembimbing Utama sekaligus Ketua Program Studi.
2. Bapak Dr. Ir. Azis Nurbambang, MS. sebagai Dosen Pembimbing Kedua.
3. Ibu Dr. Indah Susilowati, MSc. sebagai Dosen Penguji.
4. Bapak Dr.Ir. Agung Suryanto, MS. sebagai Dosen Penguji.
5. Bapak Prof. Dr. Lachmuddin Sya'rani, mantan Ketua Program Studi yang sejak awal senantiasa mendorong terlaksananya penelitian ini.
6. Bapak Gubernur Jawa Tengah yang telah memberikan ijin belajar untuk melanjutkan pendidikan Program Pascasarjana di Universitas Diponegoro Semarang.
7. Bapak Bupati Kabupaten Pati beserta staf yang telah memberikan kesempatan untuk mengadakan penelitian ini di wilayahnya.

8. Bapak Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati beserta staf, atas bantuannya dalam memberikan data serta mendampingi saat pengambilan / wawancara bersama sampel.
9. Staf Sekretariat Program Studi Magister Manajemen Sumberdaya Pantai Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bantuan pelayanan administrasi.
10. Segenap Civitas Akademika Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen Sumberdaya Pantai Universitas Diponegoro Semarang yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
11. Rekan-rekan yang telah membantu terlaksananya penelitian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.
12. Istri tercinta : Susilowati dan anak-anak tercinta : Nanda, Arif dan Nina yang senantiasa memberi semangat, dorongan moril dan do'a.
13. Semua pihak yang terkait dalam pembuatan tesis ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Kami menyadari bahwa tesis ini meskipun telah melalui proses penyempurnaan yang melibatkan banyak pihak utamanya dari Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji, namun masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat lebih meningkatkan kualitas tulisan ini.

Semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan jalan pada umat Nya yang mau berikhtiar.

Semarang, April 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.	i
Lembar Pengesahan.	ii
Lembar Pernyataan.....	iii
Abstrak.	iv
Abstract.	v
Kata Pengantar.	vi
Daftar Tabel.	xii
Daftar Ilustrasi.	xiv
Daftar Lampiran.	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1. 1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan.	9
2.2. Konsep Pembangunan Berbasis Masyarakat.	11
2.3. Konsep Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	14
2.4. Organisasi dan Pengelolaan Program PEMP.....	17
2.4.1. Pusat.	17
2.4.2. Kabupaten / Kota.	18

2.5. Partisipasi Masyarakat.	21
2.6. Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi.....	24
2.6.1. Faktor Pendidikan Formal.	25
2.6.2. Faktor Tanggungan Keluarga.	26
2.6.3. Faktor Pendapatan.	27
2.6.4. Faktor Jenis Pekerjaan.....	28
2.7. Hipotesis.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

3. 1. Metode Penelitian.	30
3. 2. Ruang Lingkup Penelitian.	30
3. 3. Lokasi Penelitian.	31
3. 4. Variabel Penelitian/Fenomena yang Diamati	32
3. 5. Jenis dan Sumber Data.	33
3.5.1. Data Primer.	33
3.5.2. Data Sekunder.	34
3.6. Instrumen Penelitian.	34
3.7. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.	34
3.7.1 Pemilihan Daerah Sampel.....	34
3.7.2 Pemilihan Sampel Anggota Masyarakat Peserta Program PEMP.	35
3.8. Teknik Pengumpulan Data.	36
3.9. Teknik Analisis.	37
3.9.1. Langkah Pengujian Uji Asumsi Klasik.	38
3.9.2. Langkah Pengujian Hipotesis.	39
3.10. Waktu dan Lokasi Penelitian.	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Keadaan Wilayah Daerah penelitian.	44
4.2. Topografi dan Jenis Tanah Daerah Penelitian.	44
4.3. Penduduk Daerah Penelitian.....	45
4.4. Potensi Perikanan Daerah Penelitian.	45
4.5. Pelaksanaan Program PEMP tahun 2001 di Kabupaten Pati.	51
4.5.1. Tahap Persiapan.	51
4.5.1.1. Sosialisasi Program PEMP.....	51
4.5.1.2. Pemilihan Lokasi.	53
4.5.1.3. Pembentukan Organisasi... ..	54
4.5.1.4. Pembentukan Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP).....	56
4.5.2. Tahap Pelaksanaan.....	56
4.5.2.1. Tahap Penyusunan Rencana Kegiatan.....	56
4.5.2.2. Tahap Penentuan Kegiatan.	57
4.5.3. Tahap Pembinaan.	59
4.5.4. Tahap Pengawasan.	60
4.5.5. Pembentukan Pengurus LEPPM3 dan Mitra Desa.	60
4.5.6. Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) dan Tenaga Pendamping Desa (TPD).....	62
4.6. Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	66
4.6.1. Tahap Perencanaan.....	66
4.6.2. Tahap Pelaksanaan.....	69
4.6.3. Tahap Pengawasan.....	75
4.7. Tingkat Partisipasi.	77

	Halaman
4.8. Pengujian Data Hasil Penelitian.	81
4.8.1. Uji Asumsi Klasik.	81
4.8.1.1. Uji Multikolinieritas.....	81
4.8.1.2. Uji Autokorelasi.....	82
4.8.2. Pengujian Hipotesis.	83
4.9. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi.	86
4.9.1. Pendidikan Formal.	87
4.9.2. Pendapatan Keluarga.	88
4.9.3. Tanggungan Keluarga.	89
4.9.4. Jenis Pekerjaan.	90
4.10. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program PEMP.....	91
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.	99
5.2. Saran – Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	107
RIWAYAT HIDUP	123

DAFTAR TABEL

	Halaman
Nomor :	
1. Variabel yang digunakan dalam analisis tingkat partisipasi peserta program PEMP.	33
2. Sebaran Sampel Untuk Masing-masing Desa.....	36
3. Rumus ANOVA.	42
4. Luas areal tambak di Kabupaten Pati tahun 1997-2002.....	46
5. Volume dan Nilai produksi budidaya perikanan di Kabupaten Pati tahun 2001-2002.....	47
6. Hasil tangkapan dan nilai hasil tangkapan ikan laut di Kabupaten Pati tahun 2001-2002.	48
7. Hasil tangkapan 8 (delapan) jenis ikan komoditas unggulan di Kabupaten Pati tahun 2001-2002.....	48
8. Volume dan Nilai produksi hasil usaha dan penangkapan ikan diperairan umum Kabupaten Pati tahun 2001-2002.....	49
9. Jumlah penduduk yang bermata pencaharian di bidang perikanan di Kabupaten Pati tahun 2001-2002.....	50
10. Realisasi Pinjaman Kebutuhan KMP Kabupaten Pati tahun 2001.....	58
11. Jumlah bantuan dana per masing-masing KMP.....	59
12. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Pengurus Kelompok.	67
13. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Sosialisasi Program PEMP.....	69

	Halaman
14. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penggalan Gagasan.....	71
15. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Usulan Kegiatan.	72
16. Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Penentuan Kegiatan Terpilih.	73
17. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perbaikan Rencana Kerja.	74
18. Tingkat Partisipasi Kelompok Masyarakat Pemanfaat Menurut Jenis Pekerjaan Pada Setiap Tahapan Kegiatan.....	77
19. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program PEMP.	81
20. Hasil Analisis Regresi Uji Multikolinieritas.	82
21. Hasil Analisis Regresi Tingkat Partisipasi Masyarakat ...	83

DAFTAR ILUSTRASI

	Halaman
Nomor :	
1. Diagram Alir Kerangka Pemikiran Analisis.	8
2. Struktur Organisasi pelaksanaan program PEMP tahun 2001.....	20
3. Struktur Organisasi Program PEMP Tingkat Kecamatan dan Desa.	55
4. Struktur Organisasi Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK).	65

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor :	Halaman
1. Data Inventarisasi Kelompok Sasaran Pada Desa Terpilih....	107
2. Data Inventarisasi Kelompok Sasaran Penerima Bantuan PEMP Tahun 2001 Pada Desa Terpilih.....	108
3. Indikator Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program PEMP.....	109
4. Hasil Tabulasi Data Primer.	115
5. Hasil Analisis Regresi	117
6. Uji Autokorelasi.....	120
7. Peta Administrasi Kabupaten Pati.	122

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jawa Tengah memiliki 2 (dua) Wilayah perairan laut yaitu Perairan Utara (laut Jawa) dan Perairan Selatan (Samudra Hindia) yang mempunyai potensi besar bagi usaha penangkapan ikan. Produksi perikanan laut di Jawa Tengah pada tahun 1990 sebesar 18.500 ton dan pada tahun 1998 meningkat menjadi 304.109,70 Ton atau rata-rata meningkat sebesar 7,36 % per tahun (Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah, 1999). Menurut Dwiponggo (1990), sebagaimana dikemukakan Tim Lemlit UNDIP (2000), bahwa pemanfaatan potensi produksi perikanan laut dari perairan utara Jawa, tingkat pemanfaatannya termasuk sangat tinggi yaitu mencapai 149 % dari potensi lestarnya. Demikian pula potensi lahan untuk tambak yang sebagian besar berada di pantai utara Jawa Tengah, dari potensi lahan tambak hanya seluas 20.000 ha, pada tahun 1996 telah mencapai 27.955 ha atau tingkat pemanfaatannya telah mencapai 139,8% (Direktorat Jendral Perikanan, 1997).

Pemanfaatan potensi yang berlebihan dan adanya tekanan penduduk terhadap potensi sumberdaya alam yang ada di wilayah pantai utara Jawa Tengah menyebabkan kondisi penduduk di kawasan ini terutama kehidupan nelayannya sangat memprihatinkan dan tidak dapat lepas dan masalah kemiskinan. Demikian pula yang terjadi atas kehidupan nelayan di Kabupaten Pati, sebagian besar nelayan yang tinggal di wilayah Pati ini adalah nelayan skala kecil yang hidup pada lingkungan yang kualitasnya rendah, sehingga berpengaruh pada sikap mental dan cara hidupnya, mereka termasuk

golongan ekonomi lemah dengan modal dan kemampuan investasi terbatas.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah klasik yang selalu dihadapi para nelayan maupun masyarakat sekitar pantai yang menggantungkan kehidupannya dari potensi sekitarnya. Walaupun kemiskinan merupakan keadaan nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari, namun mereka kadang-kadang tidak menyadari jika dirinya tergolong miskin. Kemiskinan merupakan kondisi kekurangan yang menimpa seseorang atau sekelompok masyarakat yang sebetulnya tidak dikehendaki, tetapi mereka menerima kenyataan karena tidak dapat menghindarinya.

Dalam situasi perekonomian yang sulit seperti saat ini, beban hidup nelayan kecil menjadi semakin meningkat. Pada tahun 2000, Pemerintah dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan mencoba untuk mengenalkan suatu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dengan tujuan peningkatan pendapatan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, penguatan kelembagaan sosial ekonomi dan partisipasi masyarakat dengan mendaya gunakan sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berinovasi dalam memilih, merencanakan dan menetapkan kegiatan ekonomi yang dibutuhkan berdasar musyawarah sehingga demikian diharapkan dapat tumbuh rasa ikut bertanggung jawab untuk ikut mensukseskan keberhasilan program (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001). Secara konkrit, program PEMP ini diharapkan dapat berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Peningkatan kesejahteraan yang diharapkan dapat direalisasi dalam Program PEMP, tidak hanya meliputi aspek ekonomi (pendapatan) tetapi juga meliputi aspek sosial, lingkungan dan infrastruktur.

Fokus program ini selain pengembangan aspek ekonomi untuk meningkatkan pendapatan sekaligus juga aspek sosial yaitu meningkatkan kesadaran akan sikap perilaku, etos budaya kerja serta aspek lingkungan pelestarian sumberdaya pesisir dan laut agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Demikian juga dengan aspek infrastruktur, aspek ini dibutuhkan untuk memperlancar dan menunjang mobilitas pelaksanaan kegiatan ekonomi di wilayah pesisir. Aspek-aspek tersebut selanjutnya perlu ditunjang oleh kelembagaan sosial ekonomi yang kuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Masyarakat pesisir di Jawa Tengah secara keseluruhan berjumlah sekitar 131.188 orang dan berada di 17 Kabupaten / Kota . Mereka umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pengolah, bakul ikan dan usaha yang terkait dengan kegiatan perikanan seperti penyediaan alat perikanan, penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM), perbekalan melaut dan lainnya dengan tingkat pendapatan dan taraf kesejahteraan yang rendah (Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah, 2003).

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Jawa Tengah telah dimulai sejak Tahun anggaran 2000 dan sampai Tahun Anggaran 2003. Dari 17 Kabupaten/Kota yang menerima Program ini hanya 13 Kabupaten dengan jumlah dana ekonomi produktif Rp.6.843.176.815,- untuk 272 KMP (Kelompok Masyarakat Pemanfaat) mencakup 4.457 orang dan salah satunya adalah Kabupaten Pati yang pada tahun 2001 telah menerima dana ekonomi produktif melalui Program PEMP sebesar Rp. 643.500.000,- untuk 11 KMP mencakup 550 orang meliputi kegiatan : usaha nelayan, usaha petani tambak dan bakul / pedagang ikan.

Sesuai dengan pedoman umum Program PEMP yang dikeluarkan Departemen Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Tengah, bahwa setiap penerimaan dana ekonomi produktif sifatnya

bergulir, maka setiap penerima bantuan diwajibkan mengembangkan dana tersebut untuk selanjutnya digulirkan kepada calon penerima lainnya.

Menurut Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003, untuk dana bantuan Program PEMP tahun anggaran 2001 presentase jumlah angsuran baru mencapai 18,56%, hal ini disebabkan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat penerima dana bantuan dalam pengembalian, karena masih adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa dana bantuan tersebut merupakan hibah.

Keberhasilan dalam merintis peningkatan pendapatan untuk masyarakat nelayan sangat ditentukan oleh kekuatan usaha yang bisa dikembangkan, permodalan yang dapat disediakan serta dukungan kondisi pasar.

Kegiatan usaha itu sendiri keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sumberdaya laut dan pesisir yang ada, teknologi yang tersedia serta kualitas sumberdaya manusia yang mengelolanya.

Kualitas sumberdaya manusia dicirikan oleh perilaku, etos kerja, kondisi lingkungan, tingkat pendidikan, kesehatan dan keinginan untuk maju. Hal ini menjadi sangat penting dan perlu diperhatikan dalam rangka pengembangan ekonomi yang meliputi manajemen usaha, kemitraan dan kelembagaan yang dikelolanya.

Peran Pemerintah sebagai fasilitator, mediator dan dinamisator masih sangat dibutuhkan terutama dalam penyediaan prasarana dan sarana pendukung termasuk didalamnya Kebijakan Pemerintah, akses permodalan, pasar dan tata ruang kawasan pesisir melalui kegiatan pembangunan dengan sumber pembiayaan dapat melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai konsep pembangunan berbasis masyarakat, maka proses pemberdayaan masyarakat dalam program PEMP keberhasilannya tidak saja ditentukan berbagai komponen dan prasarana yang tersedia, namun ditentukan juga oleh komponen lainnya seperti : partisipasi dan kepedulian masyarakat kelompok sasaran dengan prinsip berupaya ingin mendudukkan masyarakat sebagai pemilik program pembangunan. Dalam konsep pembangunan berbasis masyarakat maka partisipasi masyarakat merupakan hal penting, baik dalam proses perumusan program maupun pada tahap implementasinya. Menurut Syarif Hidayat dan Darwin Syamsul Bahri, (2001), pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat sangat jelas yaitu : konsep pembangunan ini mencoba untuk mendudukkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan, sehingga tercipta suatu harapan "pembangunan untuk masyarakat".

1.2. Perumusan Masalah

Program PEMP sebagai suatu konsep pembangunan berbasis masyarakat dan berkelanjutan, dalam proses pemberdayaan masyarakat berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap rencana tindak yang telah dimusyawarahkan. Upaya tersebut diharapkan dapat lebih menjamin kesinambungan peningkatan pendapatan masyarakat dan pelestarian sumberdaya alam sekitarnya.

Secara prinsip bahwa setiap pengembangan kegiatan usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir yang memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut merupakan suatu proses perubahan yang sering menyebabkan perubahan-perubahan pada sumberdaya alam sekitarnya, sehingga dalam perencanaan

pembangunan pada suatu sistem ekologi pesisir dan laut perlu diperhatikan kaidah-kaidah ekologis yang berlaku untuk mengurangi akibat negatif yang merugikan bagi kelangsungan pembangunan itu sendiri secara menyeluruh (Dietrieck G. Bengen, 2000).

Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan (2001), keberhasilan program PEMP sangat ditentukan dan didukung oleh kegiatan ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi sumberdaya lokal serta memprioritaskan partisipasi masyarakat setempat dengan memperhatikan skala dan tingkat kelayakan usahanya. Selain itu didukung pula dengan pengembangan organisasi dan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat berbasis pada budaya lokal untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi yang akan dikembangkan, hal ini untuk mengantisipasi apabila terjadi konflik sosial atas pemanfaatan sumberdaya lokal yang ada. Demikian pula untuk mencapai keberhasilan program PEMP, maka kegiatan harus dimulai dengan identifikasi potensi dan permasalahan yang ada, perlu kesesuaian kebutuhan, keinginan dan kemampuan masyarakat serta kebijakan pemerintah dan infrastruktur penunjangnya.

Pemerintah bersama pihak terkait perlu menyosialisasikan rencana program kepada berbagai pihak seperti unsur DPRD, dinas teknis terkait, masyarakat dan calon peserta program. Selain itu mengingat kondisi sosial (tingkat pendidikan, mental, perilaku) masyarakat pesisir pada umumnya belum memadai, maka dalam pelaksanaan program ini sangat diperlukan tenaga pendamping profesional dari unsur masyarakat, LSM, Dunia Usaha dan Pemerintah.

Dalam upaya pelaksanaan program pembangunan seperti halnya program PEMP, maka permasalahan yang muncul adalah bagaimana keterlibatan anggota masyarakat melalui partisipasi masyarakat sejak tahap persiapan, pelaksanaan dan pengawasan

dalam pelaksanaan program PEMP. Untuk mengetahui gambaran kerangka pemikiran teoritis dapat dilihat pada ilustrasi 1.

1.3. Tujuan Penelitian

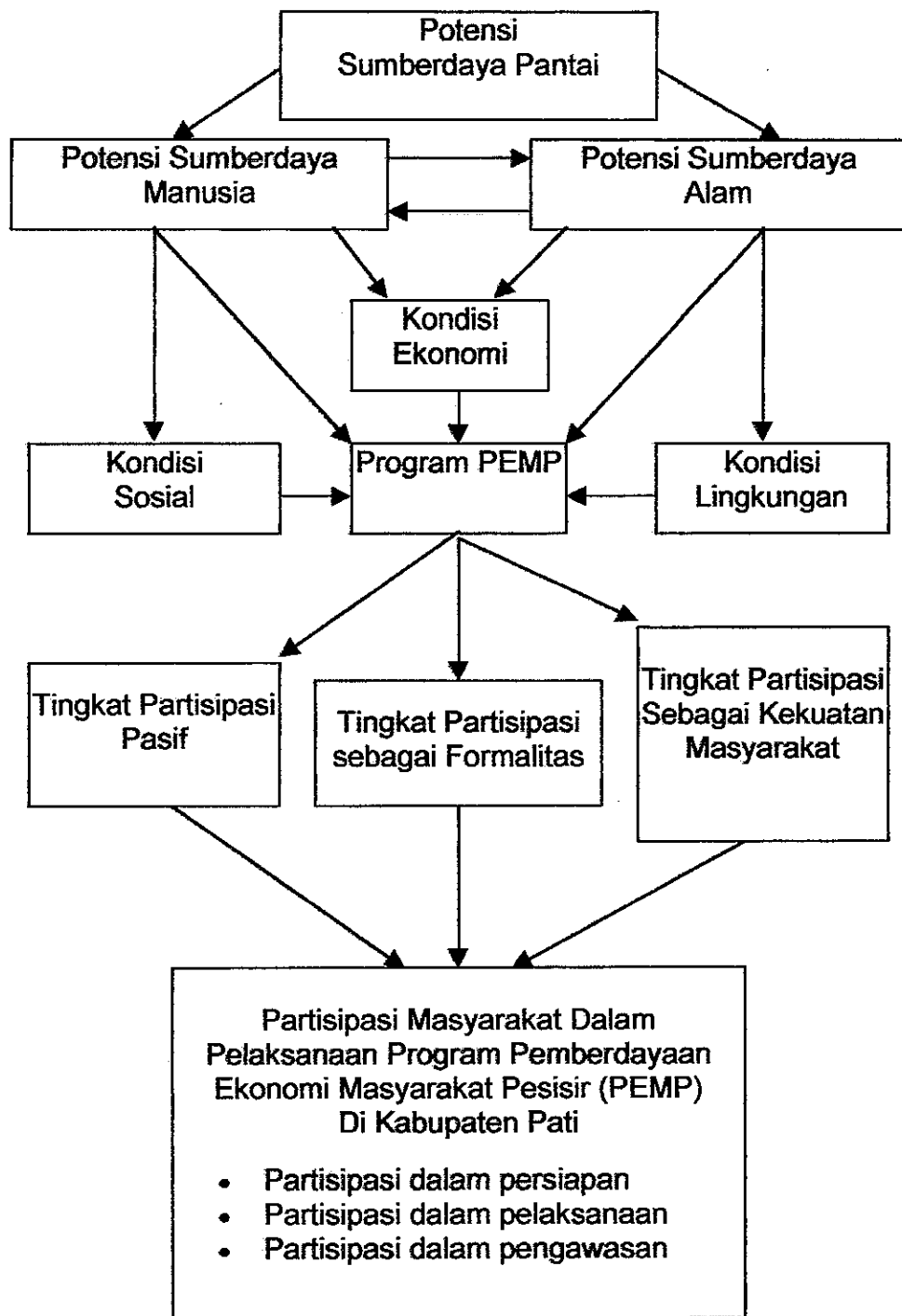
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Menentukan tingkat partisipasi masyarakat penerima dana program PEMP (nelayan, petani tambak dan pedagang ikan) terhadap pelaksanaan program PEMP di Kabupaten Pati.
- b. Menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi dan pelaksanaan program PEMP di Kabupaten Pati.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan masukan bagi pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan pelaksanaan program PEMP agar lebih baik dimasa mendatang.
- b. Sebagai informasi mengenai partisipasi masyarakat penerima bantuan program PEMP dalam setiap tahapan kegiatan.



Ilustrasi 1. Diagram Alir Kerangka Pemikiran Analisis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Indonesia sebagai negara maritim memiliki sumberdaya kelautan yang sangat berlimpah, namun kelimpahan ini belum sejalan dengan upaya untuk pemanfaatannya. Upaya pemanfaatan sumberdaya kelautan di Indonesia disatu sisi selain belum dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat, namun disisi lain terdapat pula upaya pemanfaatannya yang berlebih dan cenderung telah menimbulkan kerusakan lingkungan (Direktorat Jendral Perikanan, 1997).

Seiring program pembangunan lainnya di Indonesia, maka melalui kebijaksanaan pemerintah telah dikembangkan pembangunan wilayah pesisir. Pembangunan wilayah pesisir hakekatnya adalah pembangunan seluruh wilayah perairan dan pantai di Indonesia dengan segenap sumberdaya alam yang terkandung didalamnya maupun sumberdaya manusia yang ada untuk kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001).

Pemahaman tentang pembangunan menjadi penting karena selama ini pembangunan yang dilaksanakan kurang memperhatikan keberlanjutan program dan hasil pembangunan. Hasil pembangunan masih memberikan ketimpangan yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat dan kerusakan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan hakekatnya merupakan cermin dan pemahaman yang lebih baik atas fungsi-fungsi lingkungan hidup yang merupakan komponen sumberdaya alam yang diperlukan untuk mendukung kehidupan masyarakat.

Menurut Brundtland (1987) dalam Dipokusumo (1999), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengabaikan kemampuan dari generasi akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Pengertian pembangunan berkelanjutan juga mengandung pemahaman berkelanjutan dari aspek ekonomi maupun finansial yang mampu melakukan pemeliharaan terhadap kapital secara efisien dari investasi.

Pemahaman ini juga mengandung aksi dapat memelihara integritas ekosistem, daya dukung dan konservasi sumberdaya alam serta terciptanya partisipasi masyarakat dalam memelihara kelestarian sumberdaya alam yang menjadi sumber nafkah dan daya dukung kehidupan masyarakat (Anwar,1987).

Menurut Asdak (2001), pembangunan berkelanjutan mempunyai dimensi ekonomi, sosial dan ekologi. Dimensi ekonomi menekankan bahwa aspek pertumbuhan, pemerataan dan efisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya alam harus diupayakan secara terus menerus, dimensi sosial mencangkup isu keadilan dan proses pengelolaan sumberdaya secara partisipatif sedang demensi ekologi lebih menekankan pada pentingnya upaya-upaya untuk mencegah terganggunya fungsi dasar ekosistem.

Menurut Chambers (1991), keberhasilan pembangunan pada umumnya ditentukan oleh kombinasi antara pembangunan fisik dan pembangunan manusia, tetapi terdapat perbedaan antara keduanya, yaitu bahwa pembangunan tetap mengutamakan manusia di atas segala sesuatu sebagai paradigma pembangunan baru.

Menurut Dahuri,R (1996), pembangunan jangka panjang wilayah pesisir dan lautan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

- b. Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan pemanfaatan secara optimal dan lestari sumberdaya di wilayah pesisir dan lautan.
- c. Peningkatan kemampuan peran serta masyarakat pantai dalam pelestarian lingkungan.
- d. Peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan di wilayah pesisir dan lautan.

2.2. Konsep Pembangunan Berbasis Masyarakat

Pembangunan berbasis masyarakat merupakan salah satu pembangunan yang berusaha meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan berbasis masyarakat baik secara teoritis konseptual dan praktis operasional telah teruji dalam konteks pembangunan nasional. Artinya pembangunan berbasis masyarakat dibangun atas realita kehidupan masyarakat yang menjamin pemberdayaan masyarakat untuk berkembang dan untuk menghadapi perubahan-perubahan yang senantiasa terjadi dan untuk meningkatkan ikatan dan jalinan masyarakat sebagai suatu sistem.

Pembangunan berbasis masyarakat memerlukan partisipasi masyarakat. Pentingnya partisipasi masyarakat tersebut sangat jelas yaitu berusaha mendudukkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan sehingga tercipta "Pembangunan untuk masyarakat", dan bukan sebaliknya jika masyarakat difungsikan hanya sebagai sasaran pembangunan, maka hasil akhir yang akan dicapai tidak lebih masyarakat untuk pembangunan (Syarif Hidayat,dkk,2001).

Dalam pembangunan berbasis masyarakat, maka masyarakat memiliki potensi untuk berkembang dan mandiri dalam menghadapi tantangan dan berbagai perubahan yang terjadi. Hal ini karena

dalam proses interaksi sosial, manusia umumnya berusaha untuk memperoleh manfaat bagi kehidupannya dan sekaligus mengurangi ketidak pastian dan resiko kehidupan yang dihadapi. Selain itu melalui pengelompokan sosial, manusia berupaya melalui pengorganisasian untuk mengurangi ketidak pastian dan resiko kehidupan dalam mendapatkan akses terhadap sumberdaya sekitarnya yang ada.

Secara alamiah manusia mencari dan berinteraksi dengan manusia lain melalui sistem masyarakat (*Community system*). Pengelompokan yang bersifat alamiah dan interaktif ini lebih penting dari pada pengelompokan berdasar batasan geografis. Interaksi masyarakat terjalin oleh karena adanya ikatan – ikatan nilai dan kepentingan akan kebutuhan akan pemenuhan aspirasi– aspirasi kehidupannya. (Winoto, 1997).

Pembangunan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dibangun berdasarkan pemikiran bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi didalam proses pengambilan keputusan secara langsung atau tidak langsung yang akan mempengaruhi kehidupannya.

Pembangunan berbasis masyarakat berupaya menciptakan kondisi agar semua orang dapat menyumbangkan kemampuan secara maksimal untuk mencapai tujuan, yaitu dengan membangun kemampuan individu dalam masyarakat untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dari kondisi sekarang yang tidak mampu (Wibowo, 2003).

Menurut Victor P.H. Nikijuluw (2001), Program Pembangunan Berbasis Masyarakat adalah program pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat. Agar masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengusulkan kegiatan sesuai kebutuhan sedangkan peran pihak luar hanya bersifat advokasi yaitu sebatas mendampingi dan memberikan alternatif pemecahan masalah.

Kegagalan dan keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat ditentukan oleh kemampuan semua pihak yang terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Untuk memahami realitas masyarakat dan lingkungannya, maka keberhasilan program dan proyek perlu dibangun di atas sistem kepercayaan dan sistem nilai masyarakat tentang arti perubahan dan arti masa depan.

Pembangunan berbasis masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat. Pembangunan berbasis masyarakat yang berusaha memberdayakan masyarakat, bertujuan mendidik masyarakat agar mampu membantu dirinya sendiri dalam berusaha secara mandiri, mampu mengadopsi inovasi / teknologi serta memiliki pola pikir realistis. Mekanisme pemberdayaan dapat dilakukan melalui membangun daya itu sendiri dengan mendorong dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berusaha untuk mengembangkannya (Kartasasmita, 1996).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pembangunan berbasis masyarakat merupakan suatu sistem pembangunan yang berorientasi pada manusia dan kelompok (masyarakat) dengan lebih mengedepankan potensi, pengakuan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kemampuannya melalui berbagai kegiatan yang dapat mengarah kemandirian suatu kelompok masyarakat.

Implementasi peningkatan kemandirian masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan pendidikan baik formal dan nonformal, sosialisasi, penyuluhan dan berbagai kegiatan yang dapat memberi masukan bagi peningkatan kesadaran masyarakat.

2.3. Konsep Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).

Sebagai salah satu program pembangunan berbasis masyarakat, maka Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) bertujuan mengangkat masyarakat pesisir dari kemiskinan.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang diperkenalkan Departemen Kelautan dan Perikanan pada tahun 2000 diharapkan dapat mendorong dan memberikan kebebasan masyarakat pesisir dalam wadah kelompok untuk menentukan, merencanakan dan menetapkan kegiatan ekonomi yang dibutuhkan berdasarkan musyawarah. Dalam diri masyarakat perlu sekali ditumbuhkan rasa memiliki serta bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengawasan dan pengembangannya.

Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan (2001), Program ini memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. *Acceptable*, pilihan kegiatan ekonomi (usaha) berdasarkan potensi sumberdaya, kelayakan usaha serta kebutuhan, keinginan dan kemampuan masyarakat, sehingga memperoleh dukungan masyarakat.
- b. *Transparency*, pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka diinformasikan dan diketahui masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut memantaunya.
- c. *Accountability*, pengelolaan kegiatan harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
- d. *Responsiveness*, kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian atas beban penduduk miskin.
- e. *Quick disbursement*, penyampaian bantuan kepada masyarakat sasaran secara cepat.

- f. *Democracy*, proses pemilihan peserta dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara musyawarah.
- g. *Sustainability*, pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal dan eksternal.
- h. *Equality*, pemberian kesempatan kepada kelompok lain yang belum memperoleh kesempatan agar semua masyarakat merasakan manfaat langsung.
- i. *Competitiveness*, setiap ketentuan dalam pemanfaatan dana ekonomi produktif masyarakat diharapkan dapat mendorong terciptanya kompetisi yang sehat dan jujur dalam mengajukan kegiatan yang layak.

Sebagai salah satu program pembangunan kawasan laut dan pesisir, maka kegiatan program PEMP dalam pelaksanaannya berada di bawah koordinasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yaitu : Program dari Pemerintah Pusat dengan pembiayaan Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) yang diharapkan dapat menjadi stimulan bagi terbentuknya masyarakat pesisir yang mandiri dan sejahtera. Pelaksanaan kegiatan PEMP harus disusun dalam bingkai pendekatan yang harmonis dengan memperhatikan sistem nilai dan kelembagaan yang berkembang dalam masyarakat serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya lokal.

Secara umum tujuan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan menggunakan sumberdaya laut dan pesisir secara berkelanjutan.

Secara khusus tujuan program PEMP adalah :

- a. Memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
- b. Mengembangkan keragaman kegiatan usaha dan memperluas kesempatan kerja agar pendapatannya meningkat.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir sesuai kaidah kelestarian lingkungan.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat, aparat Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam memfasilitasi proses pengembangan yang partisipatif dan trampil.

Bentuk kegiatan program ini adalah :

- a. Pengembangan partisipasi masyarakat.
- b. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, meliputi :
 - Pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat ;
 - Pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir.
 - Pengembangan jaringan dan kelembagaan sosial ekonomi.
- c. Fasilitasi kemitraan antara masyarakat, aparat pemerintah dan swasta dalam pengembangan kegiatan usaha dan akses permodalan.
- d. Pengembangan kemampuan kelembagaan lokal dan masyarakat.

Sesuai lingkup dan tujuan PEMP, maka sasaran PEMP adalah : kelompok masyarakat pesisir dan anggota masyarakat lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan sumberdaya laut dan pesisir dengan prioritas utama dari keluarga nelayan, petani ikan (petambak), pedagang ikan dan pengolah ikan.

Selanjutnya mengenai lokasi sasaran PEMP adalah daerah yang :

- a. Mempunyai Desa/Kelurahan berpenduduk miskin relatif banyak.
- b. Mempunyai potensi sumberdaya pesisir dan laut untuk dikembangkan atau rehabilitasi.

- c. Mempunyai dukungan kebijakan pada pengembangan sumberdaya pesisir dan laut.
- d. Belum pernah / banyak menerima bantuan program sejenis.

2.4. Organisasi dan Pengelolaan Program PEMP

Untuk kelancaran pelaksanaan program PEMP dibentuk struktur organisasi yang melibatkan berbagai instansi baik di pusat maupun di daerah.

2.4.1. Pusat

Sebagai penanggungjawab program PEMP ditingkat pusat adalah : Direktur Jendral Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan.

Dalam pelaksanaan tugas, penanggungjawab berkoordinasi dengan : Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan, Deputi Kepala BAPPENAS Bidang Regional dan Sumberdaya Alam Cq. Direktur Sumberdaya Alam dan Kelautan, Direktur Kewilayahan dan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pedesaan.

Selain itu juga berkoordinasi dengan Pimpinan Unit kerja eselon I terkait lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan membantu tim pelaksanaan Program PEMP Pusat, dibentuk sekretariat PEMP Pusat yang bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Program PEMP menampung permasalahan (pengaduan) masyarakat dan melakukan penanganannya.

Secara optimal sekretariat program PEMP Pusat dibantu Konsultan Manajemen (KM) Pusat yang berfungsi memfasilitasi Sekretariat program PEMP Pusat.

2.4.2. Kabupaten / Kota

Penanggungjawab Program PEMP di Kabupaten / Kota adalah Bupati / Walikota dan penanggungjawab operasional program PEMP Kabupaten / Kota adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten / Kota, atau Dinas Teknis yang menangani bidang kelautan dan Perikanan tingkat Kabupaten / Kota.

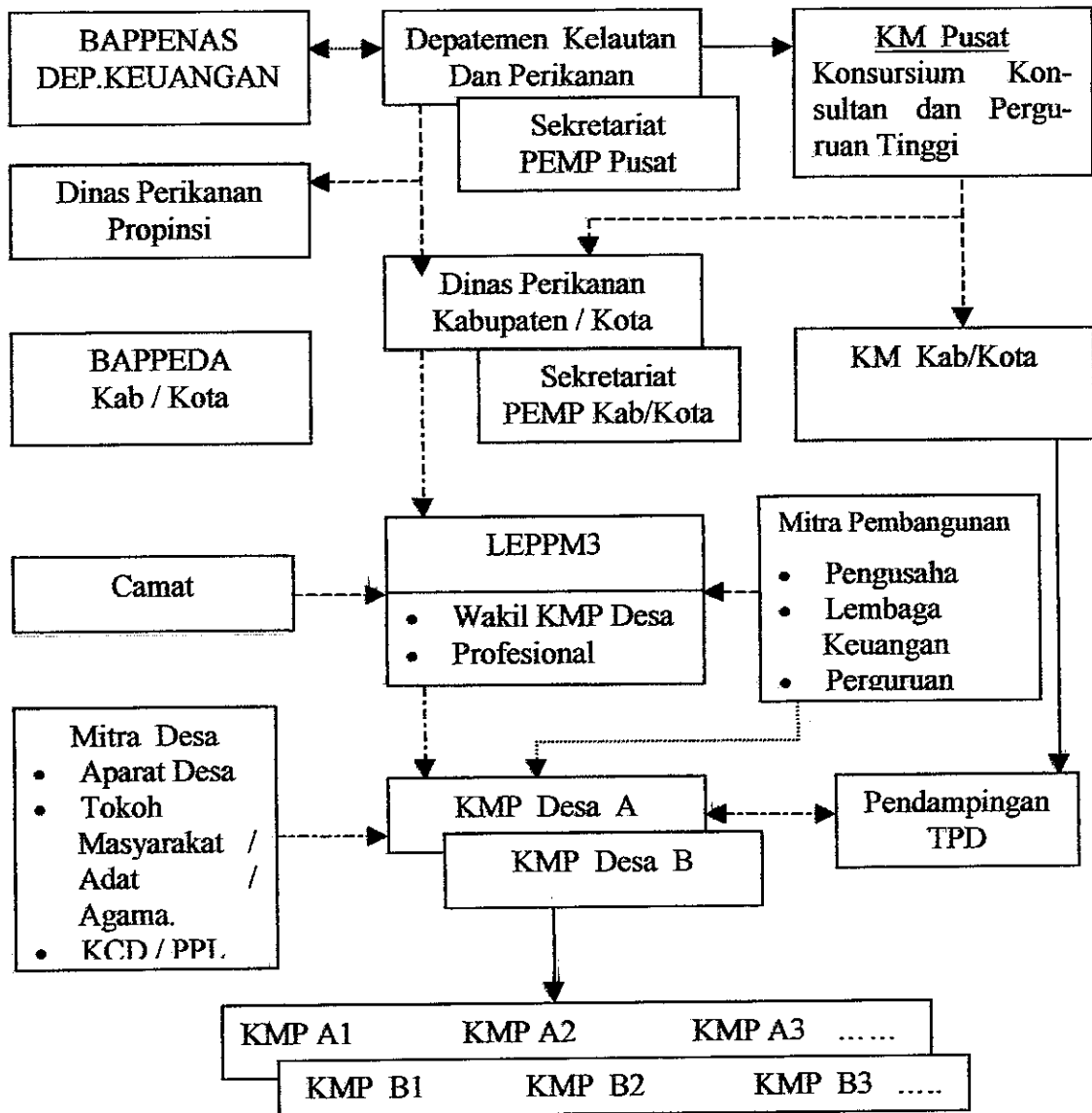
Bupati / Walikota sebagai penanggungjawab Program PEMP Kabupaten / Kota, bertugas :

- Menerbitkan Surat Keputusan tentang penunjukan Dinas Perikanan sebagai penanggungjawab operasional program PEMP.
- Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Program PEMP di wilayahnya.
- Mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan Program PEMP dan program sektoral, regional, daerah di wilayahnya untuk mendukung keberhasilan program PEMP.
- Menilai dan menindak lanjuti laporan Dinas Perikanan Kabupaten / Kota selaku penanggungjawab operasional dalam pelaksanaan program PEMP.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten / Kota sebagai penanggungjawab operasional program PEMP bertugas :

- Melakukan koordinasi dengan Dinas / Instansi Kabupaten / Kota terkait untuk pelaksanaan tugas.
- Secara operasional dibantu Konsultan Manajemen (KM) Kabupaten / Kota melakukan koordinasi perencanaan dengan program pembangunan lainnya, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan program PEMP.
- Menyiapkan tahapan-tahapan kegiatan pelaksanaan program PEMP di Kabupaten / Kota.

- **Menyusun pembentukan Sekretariat program PEMP Kabupaten / Kota yang dipimpin oleh Pemimpin Program PEMP Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan.**



Keterangan : ————— = garis komando - - - - - = garis pembinaan
 - = garis koordinasi / kerjasama

Sumber : Pedoman umum Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun 2001.

Ilustrasi 2 : Struktur Organisasi Pelaksanaan Program PEMP tahun 2001.

2.5. Partisipasi Masyarakat

Menurut Mubyarto (1988), arti partisipasi adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan diri sendiri.

Menurut Slamet. S (1985) ada 2 (dua) jenis partisipasi yaitu :

- a. Partisipasi yang diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia yaitu bahwa partisipasi masyarakat terhadap rencana / kegiatan proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi ini diukur dari kemampuan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, baik berupa waktu dan tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah.
- b. Partisipasi yang berlaku umum (universal) yaitu : partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Pengertian partisipasi oleh banyak ahli biasanya diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan.

Menurut Wardoyo (1992) Partisipasi masyarakat sangatlah mutlak demi berhasilnya pembangunan. Pembangunan tanpa partisipasi masyarakat umumnya kurang berhasil. Keikut sertaan masyarakat sebagai wujud partisipasi bisa dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan, keikut sertaan tersebut terbentuk sebagai akibat terjadinya interaksi sosial antara individu atau kelompok masyarakat yang lain dalam pembangunan.

Dalam penerapan konsep pembangunan berkelanjutan yang berbasis masyarakat, maka meskipun telah didukung dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang sangat lengkap, tetapi kedua hal tersebut tidak menjamin terwujudnya kinerja yang baik.

Titik lemah berada pada rendahnya integritas, sikap tidak konsisten, minimnya peran serta masyarakat dan lemahnya fungsi kontrol dari masyarakat (Sudharto, P.H, 1999).

Partisipasi yang diwujudkan melalui peran serta masyarakat merupakan proses, dimana masyarakat turut serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan tentang proyek, program dan kebijakan (Sudharto, P.H, 1999). Sehingga keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan bagian dari suatu konsep kegiatan pembangunan berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Guna menunjang keberhasilan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), maka menurut Sudharto, P.H (1999), peran serta masyarakat hendaknya dapat diartikan yaitu:

a. Peran serta sebagai Kebijaksanaan.

Salah satu tujuan Program PEMP yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat, maka partisipasi masyarakat terutama kelompok sasaran yang terlihat langsung memiliki hak untuk diminta pendapatnya. Informasi berupa pendapat, aspirasi dan kepentingan masyarakat akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

b. Peran serta sebagai Strategi

Partisipasi masyarakat diperlukan sebagai alat untuk memperoleh dukungan publik, hal ini dengan pertimbangan karena pendapat, aspirasi dan kepentingan masyarakat telah tertampung, sehingga dapat diperoleh keputusan secara sah.

c. Peran serta sebagai Komunikasi.

Partisipasi dilakukan berdasarkan anggapan bahwa semua komponen yang terlibat dalam program PEMP memiliki tanggung jawab untuk menampung pendapat aspirasi dan kepentingan masyarakat.

d. Peran serta sebagai media pemecahan Publik.

Partisipasi dianggap cara paling efektif untuk mengurangi ketegangan dan memecahkan konflik.

e. Peran serta sebagai Therapi Sosial.

Partisipasi perlu dilakukan untuk menyembuhkan “ Penyakit Sosial” seperti rasa keterasingan dan rasa kurang percaya diri yang sering dihadapi masyarakat.

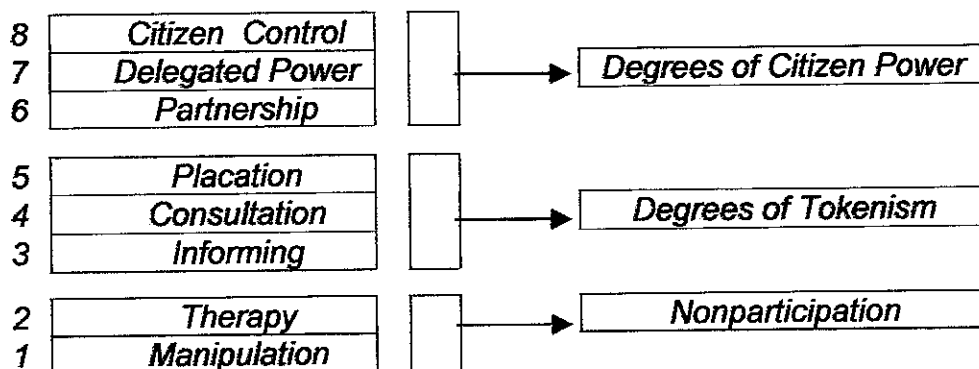
Selanjutnya menurut Sherry Arnstein (1969), sebagaimana dikemukakan Sudharto, P.H. (1999) bahwa terdapat delapan tangga partisipasi masyarakat yaitu :

- Pada Tingkat 1(satu) *Manipulation* dan Tingkat 2 (dua) *Therapy* merupakan tingkat paling bawah sebagai tingkat Non Participation atau tingkat bukan peran serta, melainkan memberi kesempatan pemegang kekuasaan untuk “ mendidik ” dan “mengobati” para peserta dalam peran serta.
- Pada Tingkat 3 (tiga) *Informing* dan Tingkat 4 (empat) *Consultation*, maka peran serta masyarakat hanya sekedar formalitas yang memungkinkan mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara, tetapi suara dan pendapat mereka belum tentu menjadi bahan bagi pengambilan keputusan.
- Pada Tingkat 5 (lima) *Placation*, maka peran serta masyarakat di pandang lebih tinggi, karena memiliki hak untuk memberikan “ *Advice* “ tetapi kekuatan untuk mengambil keputusan tetap di tangan pemrakarsa kegiatan.

- Pada Tingkat 6 (enam) *Partnership*, masyarakat memiliki ruang untuk bernegosiasi dan terlibat dalam "Trade off" dengan pemegang kekuasaan.
- Pada Tingkat 7 (tujuh) *Delegated Power* dan Tingkat 8 (delapan) *Citizen Control*, maka masyarakat memiliki kekuatan mayoritas untuk mengambil keputusan.

BAGAN

Eight Rungs on the Ladder of Citizen Participation



Sumber : Arnstein, Sherry R (1969).

2.6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

Masyarakat pesisir sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dengan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan dan pengolah ikan serta pemasok kebutuhan sarana dan prasarana produksi perikanan. Dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), tidak semua kelompok masyarakat memperoleh kesempatan sebagai pelaku pelaksana program, namun hanya difokuskan pada kelompok masyarakat pesisir yang kehidupannya relatif miskin seperti kelompok nelayan, petani tambak dan

pedagang ikan. Kelompok ini secara langsung memanfaatkan dan mengusahakan sumberdaya perikanan di pesisir dan umumnya dalam menjalankan kegiatan usaha atau kegiatan ekonominya hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga (Victor Nikijuluw, 2001).

Pemilihan pekerjaan bagi masyarakat pesisir terutama dalam kegiatan usaha atau ekonomi seperti menjadi nelayan, petani tambak dan pedagang ikan adalah pilihan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam batas-batas tertentu mereka memiliki kepribadian, gaya hidup dan kecenderungan yang bisa sama dengan manusia lain, sama dengan sebagian manusia lain dan tidak sama dengan manusia lain (Mudjahirin Thohir, 1999).

Kelompok masyarakat pesisir seperti nelayan, petani tambak dan pedagang ikan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup mempunyai corak berlainan, hal ini yang menjadikan karakter dan sikap dalam menghadapi persoalan di wilayahnya dapat berbeda pula.

Sikap dan pandangan yang berbeda dari sebagian kelompok masyarakat pesisir terhadap suatu program pembangunan yang mensyaratkan adanya suatu partisipasi aktif masyarakat, menjadikan perbedaan pula tingkat partisipasi diantara kelompok masyarakat tersebut.

Partisipasi sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap suatu proses dan kesediaan untuk membantu keberhasilan suatu rencana kegiatan sangat dipengaruhi beberapa faktor baik internal dan eksternal, seperti :

2.6.1. Faktor Pendidikan Formal.

Pendidikan formal sebagai faktor eksternal merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir

seseorang sehingga mampu merubah sikap, kepribadian dan tingkah laku seseorang. Pendidikan formal diselenggarakan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta dengan tingkat mulai Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi.

Menurut Madrie (1986), partisipasi masyarakat sebagai wujud kepedulian dan keikutsertaan masyarakat sangat dipengaruhi tingkat pendidikan formal, semakin tinggi pendidikan formal semakin tinggi pula tingkat partisipasinya, hal ini karena melalui pendidikan formal akan terbentuk sikap pribadi seseorang untuk mampu berinteraksi sosial yang selanjutnya dapat mempengaruhi pula tingkat partisipasinya terhadap suatu kegiatan di wilayahnya. Faktor eksternal untuk pendidikan formal bagi masyarakat adalah sejauh mana masyarakat dapat menikmati dan mengikuti pendidikan formal yang diselenggarakan lembaga pendidikan pemerintah maupun lembaga pendidikan swasta.

2.6.2. Faktor Tanggungan Keluarga.

Tanggungan keluarga sebagai faktor internal adalah jumlah orang dalam keluarga yang menjadi tanggungan keluarga. Semakin besar jumlah anggota keluarga, maka kebutuhan-kebutuhan keluarga juga akan meningkat.

Perhatian kepala keluarga akan tercurah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk itu kepala keluarga senantiasa berusaha meningkatkan pendapatannya agar kebutuhan keluarga dapat tercukupi.

Beban tanggungan keluarga bagi seseorang terkait dengan pendapatan, sehingga setiap kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan selalu menarik seseorang untuk mengikutinya. Keterkaitan pendapatan seseorang dengan beban

tanggungannya keluarga dapat mempengaruhi keadaan sosial ekonomi. Semakin tinggi pendapatan dan semakin ringan tanggungannya keluarga menjadikan seseorang dapat berpikir lebih jernih untuk melakukan tindakan-tindakan nyata bagi kepentingan keluarganya.

Menurut Sastroputro (1988), keadaan sosial ekonomi seseorang merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi.

Partisipasi sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap suatu proses pembangunan akan berjalan dengan baik apabila ditunjang kondisi sosial ekonomi yang baik pula.

2.6.3. Faktor Pendapatan.

Masalah pembangunan desa pada umumnya adalah sangat kecilnya peluang bagi penduduk untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat memberikan pendapatan memadai. Kurangnya peluang bekerja inilah maka banyak diantara penduduk terpaksa bekerja seadanya, tetapi belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Mubyarto, 1988).

Bagi sebagian penduduk pedesaan kesempatan memperoleh pendapatan adalah sama dengan kesempatan mencukupi kebutuhan keluarga. Semakin tinggi pendapatan , semakin tinggi pula kesempatan mencukupi kebutuhan hidupnya dan sebaliknya. Pendapatan yang diperoleh penduduk pedesaan dapat mempengaruhi status sosial ekonominya, hal ini terlihat bahwa penduduk pedesaan yang status sosial ekonominya sudah baik, cenderung akan lebih menonjol di wilayahnya.

Kelompok ini umumnya lebih tinggi tingkat partisipasinya dalam menghadapi permasalahan kebutuhan di wilayahnya, hal ini

terlihat pada kemampuannya untuk berpartisipasi misal dalam memberikan sumbangan pembangunan di wilayahnya.

Menurut Slamet, S.(1985), agar masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam pembangunan, maka diperlukan kemauan, kemampuan dan kesempatan. Bagi kelompok masyarakat yang mempunyai pendapatan tinggi, umumnya mempunyai kemauan, kemampuan dan kesempatan lebih besar dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang mempunyai pendapatan di bawahnya.

2.6.4. Faktor Jenis Pekerjaan.

Jenis pekerjaan bagi masyarakat pedesaan lebih banyak dilaksanakan bukan karena pendidikan tetapi berdasarkan pengalaman. Salah satu keadaan yang sering terjadi di pedesaan adalah bahwa peluang kerja sebenarnya cukup tersedia, namun masyarakat nampaknya tidak mampu meraihnya karena tidak memiliki ketrampilan yang disyaratkan.

Pandangan masyarakat atas pekerjaan yang ditekuninya selama ini seperti : nelayan, petani tambak dan pedagang ikan adalah pekerjaan turun temurun yang hasilnya sangat tergantung pada kemurahan alam. Pandangan masyarakat seperti ini sering mempengaruhi pola pikir dan tertanam pada jiwa masyarakat sehingga dapat mempengaruhi sikap serta perilaku masyarakat.

Golongan masyarakat yang mempunyai pandangan bahwa jenis pekerjaannya menuntut persyaratan pendidikan ketrampilan pada umumnya partisipasinya lebih besar dari pada masyarakat yang memandang bahwa jenis pekerjaan tidak memerlukan pendidikan ketrampilan (Mubyarto, 1988).

Menurut Mangatas Tampubolon (2002), masyarakat pedesaan umumnya tidak memiliki pengetahuan teknis dan ekonomis yang memadai untuk melihat bahwa masalah-masalah tertentu yang

jika dibiarkan dapat merusak, mereka tidak tahu dalam bertindak karena kurang tawuhan dan faktor perbedaan pola pikir, ada yang berpikir logis realistis dengan cara berpikir positif, optimis dan mau menerima kenyataan ada pula tidak berpikir logis realistis, kelompok ini cenderung berpikir negatif, pesimis dan lari dari kenyataan.

Masyarakat pedesaan yang dapat berpikir logis realistis atas perlunya ketrampilan pada jenis pekerjaan, menganggap bahwa berkembang pesatnya pengetahuan dan teknologi, maka kesempatan untuk meningkatkan ketrampilan menjadi hal penting (Lena Ellitan, 2002).

2.7. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : bahwa partisipasi masyarakat penerima bantuan dalam pelaksanaan program PEMP dipengaruhi faktor - faktor : pendidikan formal, jumlah tanggungan keluarga, pendapatan keluarga dan jenis pekerjaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode / teknik statistik analisis inferensial, dengan menguji hipotesis hubungan beberapa variabel bebas terhadap variabel tetap dengan uji hipotesis menggunakan regresi berganda.

Berdasarkan fungsi dan tujuannya, maka penelitian ini juga bersifat evaluasi karena berkaitan dengan suatu program tertentu untuk membantu proses pengambilan keputusan mengenai program tersebut (Farouk.M dan Djaali, 2003).

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program PEMP adalah tahapan partisipasi masyarakat yang paling dominan menurut Pedoman Umum Program PEMP yaitu :

- a. Tahap Partisipasi dalam persiapan, meliputi kegiatan :**
 - Pembentukan Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP).
 - Keikut sertaan dalam sosialisasi untuk pemahaman terhadap Program PEMP.

- b. Tahap Pelaksanaan Program, meliputi kegiatan :**
 - Penggalian gagasan.
 - Penyusunan usulan kegiatan.

- Penentuan kegiatan terpilih.
- Perkembangan pencairan dana.
- Revisi kegiatan.
- Kegiatan usulan sesuai rencana kerja.

c. Tahap Pengawasan Program, meliputi kegiatan :

Pengawasan masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan program dan pengawasan terhadap pengembalian angsuran dari penerima dana program PEMP.

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Pati, sebagai salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang mendapat bantuan dana dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) pada tahun anggaran 2001.

Penetapan lokasi dilakukan secara berjenjang dengan memilih Kecamatan yang potensial untuk melaksanakan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), berdasar beberapa acuan / kriteria untuk penetapan lokasi Kecamatan yaitu :

- 1). Kecamatan yang mempunyai Desa / Kelurahan pantai yang berpenduduk miskin relatif lebih banyak.
- 2). Kecamatan yang mempunyai potensi sumberdaya laut dan pesisir untuk dikembangkan.
- 3). Kecamatan yang belum pernah mendapatkan bantuan dana bergulir pada program lainnya.

Hasil Kajian kriteria tersebut, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dengan Nomor : 050/677

Tahun 2001 telah ditetapkan Kecamatan Dukuhseti sebagai lokasi Kecamatan Program PEMP dengan lokasi kegiatan proyek di Desa Banyutowo, Desa Kenanti dan Desa Bakalan.

3.4. Variabel Penelitian / Fenomena yang Diamati

Untuk keperluan statistik deskriptif maka, tingkat partisipasi pada masing – masing tahapan kegiatan dikelompokkan dalam 3 (tiga) Kategori yaitu Tinggi (skore = 3 (tiga)), Sedang (skore =2 (dua)) dan Rendah (skore = 1(satu)). selanjutnya nilai skore seluruh tahapan kegiatan di jumlahkan dan dikelompokkan menjadi :

Kategori Tinggi jumlah skore 41 sampai dengan 60 , partisipasi sebagai kekuatan masyarakat yaitu masyarakat memiliki ruang untuk bernegosiasi, terlibat langsung dengan pemegang kekuasaan dan pendapatnya memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan.

Kategori Sedang jumlah skore 21 sampai dengan 40, partisipasi hanya sebagai formalitas yaitu masyarakat hanya memungkinkan mendengar, memiliki hak untuk memberikan suara dan pendapat tetapi suara dan pendapat mereka belum tentu menjadi bahan bagi pengambilan keputusan dan dapat diterima sedang kekuatan untuk mengambil keputusan tetap ditangan pemrakarsa kegiatan.

Kategori Rendah jumlah skore \leq (kurang dari) 20 , sebagai bentuk bukan partisipasi karena hanya memberi kesempatan pemegang kekuasaan untuk : mendidik “ dan “ mengobati” para peserta dalam peran serta.

Selanjutnya untuk keperluan analisis regresi, maka tingkat partisipasi telah diukur dengan jumlah skore partisipasi (skala *metrics*). Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi

dilakukan analisis terhadap variabel-variabel yang diduga mempengaruhi partisipasi peserta sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1: Variabel-variabel yang digunakan dalam analisis tingkat partisipasi peserta program PEMP.

No	Nama Variabel	Kelas / Keterangan Variabel	Simbol
1.	Tingkat Partisipasi	Penjumlahan nilai skore partisipasi (<i>metric</i>).	Y_i
2.	Pendidikan formal	Tahun Sekolah	X_1
3.	Jumlah tanggungan keluarga	Jumlah orang yang menjadi tanggungan	X_2
4.	Pendapatan Keluarga	Hasil Pendapatan Keluarga (pokok dan Sampingan) yang diterima (Rp).	X_3
5.	Jenis Pekerjaan	Jenis Pekerjaan nelayan = 1 , petani tambak dan pedagang ikan = 0.	X_4

3.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data yang akan dikumpulkan meliputi :

3.5.1 Data Primer

- Identitas peserta.
- Status.
- Pendidikan.
- Jumlah tanggungan keluarga.
- Jenis kegiatan usaha.
- Pendapatan.

- Pandangan terhadap program PEMP.
- Partisipasi pada setiap tahapan kegiatan.
- Data lain yang menunjang tujuan penelitian.

3.5.2 Data Sekunder

- Lokasi dan topografi.
- Keadaan penduduk.
- Jumlah nelayan.
- Jumlah produksi perikanan.
- Prasarana dan sarana pendukung.
- Jumlah anggaran program PEMP.
- Data lain yang menunjang tujuan penelitian.

3.6. Instrumen Penelitian

Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah : Kuesioner terdiri dari daftar pertanyaan yang disampaikan kepada responden untuk di jawab.

3.7. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

3.7.1 Pemilihan Daerah Sampel

Lokasi terpilih adalah Kecamatan Dukuhseti meliputi 3 (tiga) Desa yaitu : Desa Banyutowo, Desa Kenanti dan Desa Bakalan yang telah ditunjuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, nomor: 050 / 677 Tahun 2001 sebagai lokasi pelaksanaan program PEMP tahun 2001.

3.7.2 Pemilihan Sampel Anggota Masyarakat Peserta Program PEMP

Pemilihan sampel responden dilakukan dengan mengambil 60 (enam puluh) sampel dari sejumlah populasi anggota masyarakat peserta program PEMP sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) orang yang dilakukan dengan teknik *Stratified Random Sampling* dengan pertimbangan karena populasi terdiri 3 (tiga) kelompok (nelayan, petani tambak dan pedagang ikan) yang dalam batas – batas tertentu mereka memiliki kepribadian, gaya hidup dan kecenderungan yang bisa sama dengan manusia lain, sama dengan sebagian manusia lain dan tidak sama dengan manusia lain (Mudjahirin Thohir,1999). Dengan asumsi bahwa ke 3 (tiga) kelompok (nelayan, petani tambak dan pedagang ikan) mempunyai karakteristik tidak homogen, maka populasi dapat distratifikasi atau di bagi ke dalam sub-sub populasi, sehingga satuan-satuan elemen dalam masing-masing sub populasi menjadi homogen (Farouk Muhammad dan Djaali, 2003).

Selanjutnya dari populasi di ambil 60 (enam puluh) orang secara proposional berdasar jumlah sub populasi di masing-masing desa dan setelah jumlah sampel dapat ditetapkan, maka berikutnya sampel di ambil secara random. Untuk mengetahui sebaran sampel sebanyak 60 (enam puluh) orang dapat di lihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2 : Sebaran Sampel Untuk Masing-masing Desa.

No	Desa	Kelompok penerima bantuan (populasi)		Jumlah sampel			
		Nama	Jumlah anggota	Nelayan	Petani tambak	Pedagang Ikan	Jumlah
1.	Banyutowo	Lancar Jaya	49	5	-	-	5
		Tengiri Jaya	51	6	-	-	6
		Tani Makmur	38	-	4	-	4
		Sumber laut	50	6	-	-	6
		Mina Langgeng	71	-	-	7	7
		Jumlah	259	17	4	7	28
2.	Bakalan	KMP Nelayan	68	8	-	-	8
		KMP Pedagang	18	-	-	2	2
		KMP Tambak	83	-	9	-	9
		Jumlah	169	8	9	2	19
3.	Kenanti	KMP Nelayan	66	7	-	-	7
		KMP Pedagang	19	-	-	2	2
		KMP Tambak	37	-	4	-	4
		Jumlah	122	7	4	2	13
Jumlah			550	32	17	11	60

Sumber : Analisis Data Sekunder.

3.8. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan :

- a. Teknik observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung, mencatat dengan sistimatis subyek yang diteliti dan

memeriksa kembali data dan fakta untuk memperoleh gambaran yang jelas.

- b. Teknik wawancara yaitu melakukan pencatatan atas pertanyaan yang diajukan kepada anggota masyarakat sampel untuk memperoleh keterangan – keterangan yang diperlukan.
- c. Teknik dokumentasi yaitu mencatat data yang telah ada hubungan dengan penelitian ini.

3.9. Teknik Analisis

Berdasarkan hubungan antara variabel yang berfungsi sebagai variabel yang dijelaskan yaitu Y (variabel tetap) dan variabel yang berfungsi menjelaskan yaitu X (variabel bebas), maka hubungan variabel tetap dan bebasnya diasumsikan mempunyai hubungan garis linier berganda yang dapat dipertanggung jawabkan.

Secara matematik hubungan tersebut

$$y_i = a + b_1 X_{1i} + b_2 X_{2i} + b_3 X_{3i} + \dots + b_k X_{ki} + e \dots (1)$$

• Bentuk Persamaan yang Digunakan Pengujian

$$y_i = a + b_1 X_{1i} + b_2 X_{2i} + b_3 X_{3i} + b_4 X_{4i} + e \dots (2)$$

Dimana: y_i = Partisipasi (Jumlah skore 20 sampai dengan 60).

X_{1i} = Pendidikan formal (tahun).

X_{2i} = Tanggungan keluarga (orang).

X_{3i} = Pendapatan keluarga (rupiah)

X_{4i} = Jenis pekerjaan (nelayan=1,petani tambak dan pedagang ikan = 0).

a = Intersep.

b_1, b_2, b_3, b_4 , = Konstanta Regresi.

e = Error / Simpangan.

3.9.1. Langkah Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum uji hipotesis regresi linier berganda dilakukan, maka perlu uji asumsi – asumsi klasik yang mendasari penggunaan persamaan regresi linier berganda. Asumsi klasik penting yang akan diuji dalam penelitian yaitu : Multikolinieritas dan Autokorelasi.

3.9.1.1. Uji Multikolinieritas.

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji adanya korelasi antara variabel bebas (*independent*) dalam suatu model regresi. Asumsi model regresi linier klasik menjelaskan bahwa model yang baik tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel bebas yang termasuk dalam model (Gujarati, 1995).

Untuk menguji adanya multikolinieritas diantara variabel bebas dilakukan pengujian dengan *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance* yaitu untuk menunjukkan variabel bebas mana yang dijelaskan variabel bebas lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas

terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya.

Secara umum nilai yang dipakai untuk melihat ada tidaknya multikolinieritas atas variabel bebas dalam model regresi berganda adalah melihat nilai dari *variance inflection factor (VIF)*, jika nilai VIF lebih dari 10 (sepuluh) maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas yang berat (Gujarati, 1995).

3.9.1.2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi diantara gangguan μ_i yang masuk kedalam fungsi regresi populasi μ_i . Dalam model regresi linier klasik di asumsikan bahwa tidak ada autokorelasi.

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat dilakukan dengan metode analisis statistik \hat{d} dari *Durbin Waston* yaitu mengamati nilai d , jika nilai $d > du$ atau $d < 4-du$ atau nilai d mendekati 2 dikatakan tidak terjadi autokorelasi (Gujarati, 1995),

3.9.2. Langkah Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui apakah hubungan variabel tetap dan variabel bebas yang diasumsikan dalam

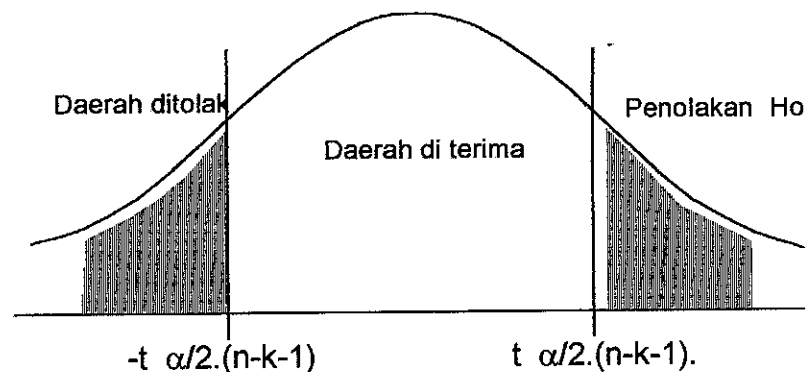
penelitian ini mempunyai hubungan garis linier berganda, maka dalam pengujiannya perlu dilakukan :

- a. Pengujian koefisien regresi (uji parsial), yaitu untuk memastikan apakah variabel bebas yang terdapat dalam persamaan tersebut secara individu berpengaruh terhadap nilai variabel tetap (uji parsial).

Cara pengujian :

- 1). Dengan membandingkan t hitung dan t tabel

- Hipotesis nihil, $H_0, b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 0$.
- Hipotesis alternatif. $H_a, b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq 0$.
- Tingkat signifikan : $\alpha = 5\%$.



- Kriteria Pengujian :

Parameter akan signifikan, bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

H_0 diterima, bila

$$-t_{\alpha/2, (n-k-1)} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\alpha/2, (n-k-1)}$$

H_0 ditolak, bila

$$t_{\text{hitung}} > t_{\alpha/2, (n-k-1)} \text{ atau}$$

$$t_{\text{hitung}} < -t_{\alpha/2, (n-k-1)}$$

- Perhitungan :

$$t = \frac{b_i - \beta_i}{S_b}$$

- Kesimpulan : Menolak atau menerima hipotesis nihil.

2). Berdasarkan probabilitas pada $\alpha = 0,05$.

Ho diterima apabila probabilitas $> 0,05$.

Ho ditolak apabila probabilitas $< 0,05$.

b. Persentase pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap nilai variabel tetap yang ditunjukkan besarnya koefisien determinan (R^2).

$$R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS}$$

Dimana :

RSS = *Residual Sum of Square.*

TSS = *Total Sum of Square.*

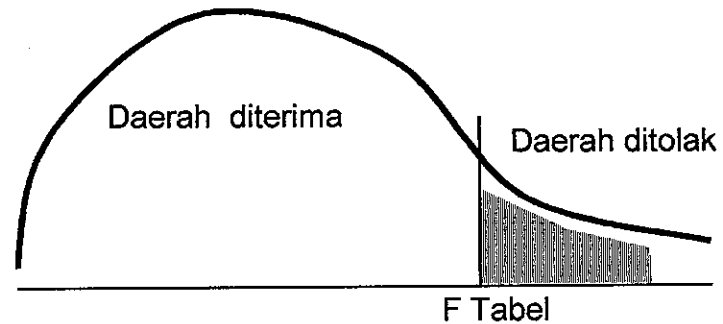
c. Pengujian terhadap pengaruh semua variabel bebas secara bersama (Uji Simultan).

Langkah Pengujian Hipotesis.

1). Dengan membandingkan F hitung dan F tabel.

- Hipotesis nihil, Ho : variasi perubahan nilai variabel bebas tidak dapat menjelaskan variasi perubahan nilai variabel tetap .
- Hipotesis alternatif, Ha : Variasi perubahan nilai menjelaskan variasi perubahan nilai variabel tetap.

- Kriteria Pengujian :



H_0 diterima, apabila $F \text{ Hitung} \leq F \text{ Tabel } \alpha 5\%$

H_0 ditolak, apabila $F \text{ Hitung} > F \text{ Tabel } \alpha 5\%$

- Perhitungan :

Menggunakan analisis varians (ANOVA) dengan menggunakan metode kuadrat terkecil dari koefisien regresi masing-masing variabel dengan rumus sebagai berikut :

Tabel 3 : Rumus ANOVA.

Model	DB	Jumlah kuadrat (JK)	Rata-rata jumlah kuadrat (RJK)	F hitung	F tabel
Regresi	$k - 1$	JK. Reg	RJK.Reg.	RJK.Reg.	$\alpha (n-k-1)$
Residual	$n - k - 1$	JK. Res	RJK.Res	RJK.Res	
Total	$n - 1$				

Dimana :

$$JK \text{ Reg.} = b_1 \sum Y_i \cdot X_{1i} + b_2 \sum Y_i \cdot X_{2i} + b_3 \sum Y_i \cdot X_{3i} + \dots + b_k \sum Y_i \cdot X_{ki} \dots \dots \dots (3)$$

$$JK \text{ Res.} = \sum (y_i - \bar{y}_i)^2 \dots \dots \dots (4)$$

$$F \text{ Hitung} = \frac{JK \text{ Reg} / k}{JK \text{ Res} / (n-k-1)} = \frac{RJK \text{ Reg}}{RJK \text{ Res}}$$

- Kesimpulan : Menerima atau menolak hipotesis nihil.

2). Berdasarkan probabilitas pada $\alpha = 0,05$.

Ho diterima apabila probabilitas $> 0,05$.

Ho ditolak apabila probabilitas $< 0,05$.

3.10. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 16 Oktober 2002 sampai dengan 16 Oktober 2003 dengan mengunjungi Dinas terkait Kabupaten Pati untuk memperoleh informasi data sekunder sedangkan data primer di peroleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan terhadap 60 responden yang tersebar di 3 (tiga) Desa, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati yaitu: Desa Banyutowo, Desa Bakalan dan Desa Kenanti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4. 1. Keadaan Wilayah Daerah Penelitian

Kabupaten Pati merupakan salah satu Kabupaten dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang terletak di $110^{\circ},50' - 111^{\circ},15'$ Bujur Timur dan $6^{\circ},25' - 7^{\circ},00'$ Lintang Selatan. Secara geografis, wilayah Kabupaten Pati berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa, sebelah barat dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara, sebelah selatan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora serta sebelah timur dengan Kabupaten Rembang dan Laut Jawa.

Kabupaten Pati dengan luas wilayah $1.503,68 \text{ km}^2$ terbagi menjadi 21 (dua puluh satu) Kecamatan, 400 (empat ratus) Desa dan 5 (lima) Kelurahan. Kecamatan Sukolilo merupakan Kecamatan yang paling luas yaitu $154,24 \text{ km}^2$, sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Wedarijaksa yaitu $40,54 \text{ km}^2$.

4.2. Topografi dan Jenis Tanah Daerah Penelitian

Kabupaten Pati merupakan wilayah yang memiliki dataran rendah hingga perbukitan dengan ketinggian antara 0 meter sampai dengan 380 meter dari permukaan laut dan memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 60 km dengan pembagian berdasarkan topografi sebagai berikut :

- Dataran rendah berada di bagian utara, tengah dan timur dan sebagian kecil di barat dan selatan.

- Dataran pegunungan berada di bagian barat yaitu Gunung Muria dan pegunungan kapur di daerah Pati selatan.

Kabupaten Pati juga memiliki daerah kritis terutama di wilayah pegunungan Kendeng dan lereng Gunung Muria, serta terdapat daerah tangkapan air berupa Waduk di Kecamatan Gembong di lereng Gunung Muria.

Menurut jenis tanahnya dapat dibedakan yaitu wilayah utara jenis tanah adalah *Red Yellow, Latosol, Alluvial, Hidromer* dan *Regosol*, sedangkan di wilayah selatan jenis tanahnya adalah *Alluvial, Hidromer* dan *gromosol*.

4.3. Penduduk Daerah Penelitian

Pada tahun 2002 jumlah penduduk di Kabupaten Pati adalah 1.187.602 orang, terdiri dari laki-laki 585.265 orang (49,28%) dan perempuan 602.337 orang (50,72%).

Menurut usia produktif dan tidak produktif, jumlah penduduk pada tahun 2002 dapat dibagi : usia produktif (15 – 64 tahun) sebanyak 803.657 orang, serta usia tidak produktif (0 – 14 tahun) sebanyak 314.283 orang dan usia di atas 65 tahun sebanyak 69.662 orang.

4.4. Potensi Perikanan Daerah Penelitian

Kabupaten Pati sebagai daerah agraris, maka sebagian besar mata pencaharian penduduk ada di sektor pertanian, yaitu budidaya pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Kegiatan perikanan di Kabupaten Pati yang menonjol adalah kegiatan budidaya dan usaha penangkapan ikan laut. Kegiatan budidaya perikanan meliputi 6 (enam) jenis budidaya yaitu tambak, kolam,

sungai, genangan, waduk dan rawa. Budidaya tambak mengalami perkembangan pesat, hal ini terlihat pada tahun 1997 luas tambak hanya 8.108 ha di 7 (tujuh) Kecamatan, sedangkan pada tahun 2002 berkembang menjadi 10.603 ha atau naik 30,80% dengan tambahan wilayah menjadi 10 Kecamatan. Perkembangan luas areal tambak maupun wilayah Kecamatan di Kabupaten Pati selama tahun 1997 – tahun 2002 dapat terlihat pada tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4 : Luas areal tambak di Kabupaten Pati tahun 1997 – 2002

No	Kecamatan	Luas areal Tambak (ha)		Peningkatan (%)
		1997	2002	
1.	Kayen	-	225	100,00
2.	Batangan	1.422	1.610	13,22
3.	Juwana	1.904	3.087	62,13
4.	Jakenan	-	136	100,00
5.	Gabus	-	44	100,00
6.	Wedarijaksa	643	769	19,60
7.	Trangkil	1.163	1.167	0,34
8.	Margoyoso	1.098	1.430	30,24
9.	Tayu	677	818	20,83
10.	Dukuhseti	1.201	1.317	9,66
Jumlah		8.108	10.603	30,80

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Pati, 2003.

Dari tabel 4 di atas terlihat bahwa peningkatan areal tambak terjadi karena adanya peningkatan luas areal tambak terutama terbesar di Kecamatan Juwana mencapai 62,13% dan Kecamatan Margoyoso mencapai 30,24%, juga akibat adanya pembukaan areal tambak baru terutama di Kecamatan Kayen, Jakenan, dan Gabus.

Mengenai volume dan nilai produksi hasil budidaya perikanan dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5 : Volume dan Nilai produksi budidaya perikanan di Kabupaten Pati tahun 2001 – 2002

No	Asal Produksi	Tahun		Peningkatan (%)
		2001	2002	
1.	Tambak			
	- Produksi(ton)	13.346,600	13.843,875	3,72
	- Nilai (Rp.1000)	487.562.056	512.223.375	5,06
2.	Kolam			
	- Produksi(ton)	1.327,9	1.407,220	2,49
	- Nilai (Rp.1000)	8.301.518	9.146.930	10,18
3.	Kolam Bandeng.			
	- Produksi(ton)	94,80	295,210	211,40
	- Nilai (Rp.1000)	663.600	2.066.470	211,40

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, 2003.

Dari tabel 5 di atas terlihat, bahwa budidaya perikanan tambak masih memberikan hasil produksi budidaya terbesar, sedangkan hasil produksi kolam bandeng air tawar juga menunjukkan peningkatan tinggi, hal ini disebabkan petani tambak mulai tertarik untuk mengembangkan dan memanfaatkan kolam air tawar untuk budidaya bandeng.

Dalam usaha penangkapan ikan laut, perkembangan produksi mengalami peningkatan terutama pada jenis ikan komersial dengan total produksi pada tahun 2002 mencapai 55.931,013 ton dengan nilai Rp. 181 milyar lebih.

Produksi ikan laut di Kabupaten Pati selain memberikan pendapatan bagi masyarakat terutama nelayan, juga memberikan sumbangan yang relatif besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari 26 (dua puluh enam) jenis ikan komersial yang tertangkap, terdapat 8 (delapan) jenis ikan yang menjadi komoditas unggulan hasil tangkapan yaitu : kakap merah, layang, kembung, teri, tengiri, tongkol, udang putih dan cumi-cumi.

Perkembangan 2 (dua) tahun terakhir, hasil tangkapan dan nilai hasil tangkapannya dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6 : Hasil tangkapan dan nilai hasil tangkapan ikan laut di Kabupaten Pati tahun 2001 – 2002

No	Usaha penangkapan ikan laut	Tahun		Peningkatan (%)
		2001	2002	
1.	Hasil tangkapan (ton)	43.924,3	55.931,013	27,33
2.	Nilai hasil tangkapan (Rp.1000)	137.792.652,5	181.844.955,33	31,96

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, 2003.

Dari tabel 6 di atas terlihat selama tahun 2001 – 2002, terdapat kenaikan hasil tangkapan meningkat sebesar 27,33% dengan nilai produksinya meningkat sebesar 31,96%.

Selanjutnya mengenai hasil tangkapan 8 (delapan) jenis komoditas unggulan di Kabupaten Pati dapat terlihat pada tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7 : Hasil tangkapan 8(delapan) jenis ikan komoditas unggulan di Kabupaten Pati tahun 2001 – 2002

No	Jenis Ikan	Hasil tangkapan (ton)		Peningkatan (%)
		2001	2002	
1.	Kakap merah	261.405	233.817	-10,55
2.	Layang	13.846.323	15.481.775	11,81
3.	Kembung	3.269.159	3.820.761	8,16
4.	Teri	14.306	14.042	-1,84
5.	Tengiri	22.205	385.442	73,46
6.	Tongkol	564.453	1.213.281	114,94
7.	Udang putih	58.714,5	260.112	343
8.	Cumi-cumi	104.739	80.789	22,86
Jumlah		18.341.304,5	21.490.019	17,16

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, 2003.

Dari tabel 7 di atas terlihat bahwa, meskipun secara keseluruhan hasil tangkapan mengalami peningkatan sebesar 17,16%, namun untuk beberapa jenis ikan mengalami penurunan yaitu : kakap

merah dan teri, sedangkan jenis ikan yang peningkatannya cukup tinggi yaitu udang putih, tongkol dan tengiri.

Hasil perikanan di Kabupaten Pati, selain diperoleh dari usaha budidaya dan usaha penangkapan ikan laut juga dari usaha dan penangkapan di perairan umum dengan perkembangan sebagaimana tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8 : Volume dan Nilai produksi hasil usaha dan penangkapan ikan diperairan umum Kabupaten Pati tahun 2001 – 2002

No	Asal Produksi	Tahun				Peningkatan (%)
		2001	%	2002	%	
1.	Waduk					
	- Produksi(ton)	28,1	27,02	36,062	33,15	28,33
	- Nilai (Rp.1000)	186.426,600	26,31	312.744	35,07	67,76
2.	Sungai					
	- Produksi(ton)	59,1	58,83	65,921	60,60	11,54
	- Nilai (Rp.1000)	402.302,500	56,77	531.447	59,59	10,18
3.	Rawa					
	- Produksi(ton)	16,8	16,15	6,799	6,25	-59,53
	- Nilai (Rp.1000)	119.887,000	16,92	47.593	5,34	-60,30
	Total					
	- Produkai	104	100	108,782	100	
	- Nilai(Rp.1000)	708.616,100	100	891.784,000	100	

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, 2003.

Dari tabel 8 di atas terlihat bahwa untuk hasil usaha dan penangkapan ikan di waduk mengalami peningkatan sebesar 28,33% dengan nilai produksi meningkat sebesar 67,76%, peningkatan ini terjadi karena meningkatnya minat masyarakat terutama petani sekitar waduk untuk mengembangkan budidaya ikan karamba, sedangkan penangkapan ikan di rawa, mengalami penurunan hal ini terkait dengan menurunnya populasi ikan akibat

tangkapan tahun sebelumnya yang tidak diikuti dengan upaya untuk melestarikannya.

Potensi perikanan di Kabupaten Pati selain mampu memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar juga mampu memberikan lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan masyarakat.

Perkembangan jumlah penduduk yang bermata pencaharian di bidang perikanan sejak tahun 2000 mengalami peningkatan, hal ini dapat terlihat pada tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 9 : Jumlah penduduk yang bermata pencaharian di bidang perikanan di Kabupaten Pati tahun 2001 – 2002

No	Mata Pencaharian	Pengembangan jumlah penduduk pada tahun (orang)					Rata Rata Kenaikan (%)
		2001	2002	Kenaikan (%)	2002	Kenaikan (%)	
1.	Nelayan	5.956	6.282	5,47	6.778	7,90	6,69
	• Perairan umum	548	571	4,20	581	1,75	2,98
	• Laut	5.408	5.711	5,60	6.197	8,51	7,06
2.	Petani tambak	9.233	9.459	2,45	9.482	0,24	1,35
3.	Petani ikan	1.678	1.112	-33,73	1.143	2,79	-15,47
4.	Pedagang ikan	1.194	2.040	70,85	2.101	2,99	36,92
5.	Pengolah ikan	276	285	3,26	307	7,72	5,49
	Jumlah	18.337	19.178	4,59	19.811	3,30	3,95

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, 2003.

Dari tabel 9 di atas terlihat bahwa kenaikan jumlah penduduk yang bermata pencaharian di bidang perikanan semakin meningkat, terutama pada jenis mata pencaharian : nelayan laut, pedagang ikan dan pengolah ikan.

Kondisi tersebut melalui pembinaan intensif dapat menjadi modal dasar perkembangan industri perikanan di Kabupaten Pati.

Hasil produksi penangkapan ikan laut di Kabupaten Pati yang mengalami peningkatan, sangat ditunjang adanya sarana dan prasarana pemasaran terutama dengan tersedianya fasilitas pelelangan ikan, Kabupaten Pati memiliki 7 (tujuh) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yaitu : TPI Bajomulyo di Juwana, TPI Pecangaan di Batangan, TPI Margomulyo di Tayu, TPI Sambiroto di Tayu, TPI Banyutowo di Dukuhseti , TPI Puncel di Dukuhseti dan TPI Alasdowo di Dukuhseti.

Dari ke 7 TPI tersebut di atas, TPI Bajomulyo merupakan TPI yang dapat memberikan kontribusi tersebar baik hasil produksi, nilai produksi serta sumbangan jasa TPI kepada Pemerintah Daerah.

4.5. Pelaksanaan Program PEMP tahun 2001 di Kabupaten Pati

Pada tahun anggaran 2001, Kabupaten Pati memperoleh dana APBN untuk pelaksanaan program PEMP berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 643.500.000,-. Sesuai Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun 2001 yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, maka setelah terbentuk Tim Pelaksana / Sekretariat PEMP Kabupaten bersama Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) melakukan beberapa tahapan - tahapan yaitu :

4.5.1. Tahap Persiapan

4.5.1.1. Sosialisasi Program PEMP

Untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunjang program PEMP maka partisipasi masyarakat perlu ditumbuhkan sejak perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Program PEMP berupaya untuk memperbaiki keterkaitan ekonomi terutama dalam rangka meningkatkan dan memperlancar proses produksi, pengelolaan dan pemasaran hasil produksi masyarakat pesisir disuatu wilayah dengan membentuk jaringan kemitraan dari pihak swasta serta dukungan kemitraan dari pihak – pihak terkait lainnya.

Upaya untuk menciptakan jaringan kemitraan tersebut perlu difasilitasi dengan mempertemukan pihak terkait baik dari unsur masyarakat calon penerima bantuan, pihak swasta dan pihak pemerintah bersama DPRD Kabupaten.

Ketiga komponen tersebut akan dihimpun dalam wadah jaringan kemitraan sehingga terbentuk kesepakatan dan kesepahaman dalam pengembangan ekonomi masyarakat pesisir sesuai dengan fungsi, peran dan kapasitas kewenangan masing-masing.

Dalam rangka penetapan kesepakatan dan kesepahaman diantara pihak terkait maka perlu adanya sosialisasi.

Sosialisasi itu sendiri pada dasarnya bertujuan agar semua pihak yang terlihat dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dapat memahami, mengenal, membantu dan menunjang pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan optimal.

Sosialisasi dilakukan melalui berbagai jenjang dari tingkat Kabupaten / Kota sampai tingkat Desa.

a. Sosialisasi Tingkat Kabupaten

Sosialisasi tingkat Kabupaten bertujuan memberikan penjelasan mengenai filosofi dasar, maksud dan tujuan,

pendekatan, sasaran dan mekanisme pelaksanaan program PEMP.

Sosialisasi diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yang difasilitasi Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) pada tanggal 24 September 2001.

Peserta Sosialisasi tingkat Kabupaten yaitu Instansi teknis terkait tingkat Kabupaten, DPRD Kabupaten, LSM, Perguruan Tinggi, Camat dan pihak terkait.

b. Sosialisasi Tingkat Kecamatan

Sosialisasi Tingkat Kecamatan bertujuan menyebar luaskan informasi mengenai PEMP, pola pelaksanaan kelompok sasaran dan identifikasi LEPPM3 serta Mitra Desa.

c. Sosialisasi Tingkat Desa

Sosialisasi tingkat Desa bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan PEMP, mekanisme pelaksanaan, kelembagaan tingkat Desa dan pembentukan Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP).

Sosialisasi Tingkat Desa diselenggarakan pada tanggal 17 dan 20 Oktober 2001 oleh Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) dan dihadiri : Pemimpin Program PEMP Kabupaten, Camat, Kepala Desa / Aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Lembaga tingkat Desa dan Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP).

4.5.1.2. Pemilihan Lokasi

Pemilihan sasaran lokasi program PEMP dengan memperhatikan karakteristik wilayah pesisir yang ada di

Kabupaten Pati, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati telah menetapkan lokasi Kecamatan berdasar beberapa acuan / karakteristik yaitu :

- Kecamatan yang mempunyai Desa / Kelurahan pantai lebih banyak.
- Kecamatan yang mempunyai potensi sumberdaya laut dan pesisir yang masih mampu untuk dikembangkan.
- Kecamatan yang belum pernah mendapatkan bantuan dana bergulir dari program lainnya.

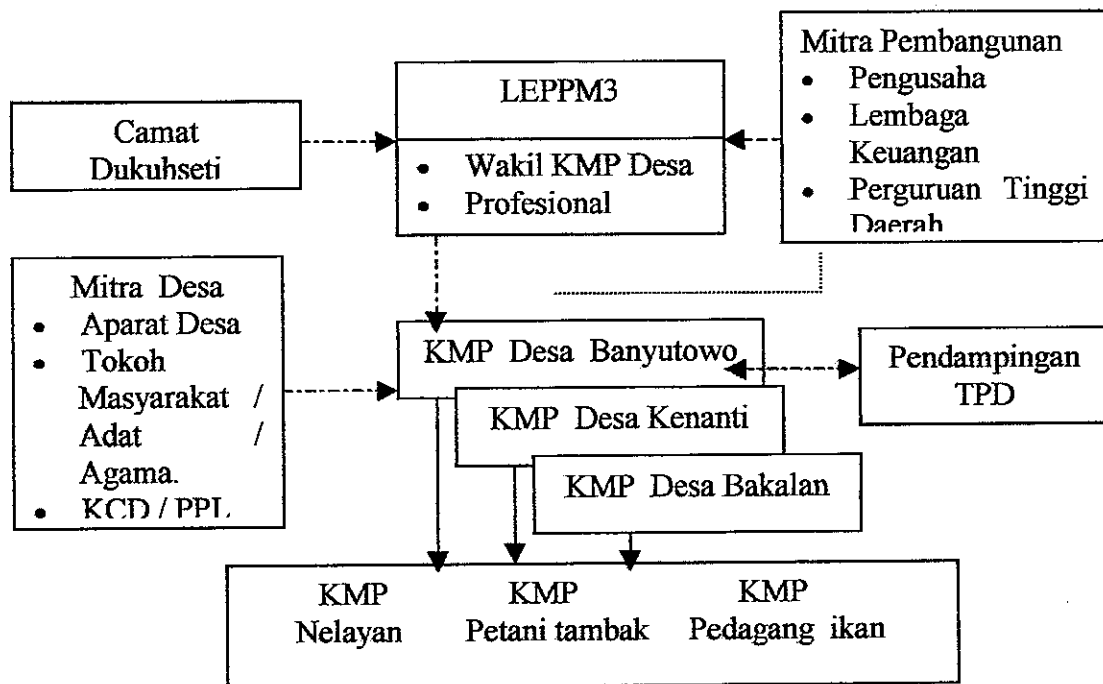
Mengacu kriteria tersebut, maka dipilih Kecamatan Dukuhseti dengan Desa terpilihnya adalah Desa Banyutowo. Desa Kenanti dan Desa Bakalan selanjutnya lokasi tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Nomor 050/677 tahun 2001.

4.5.1.3. Pembentukan Organisasi

Untuk menguatkan kelembagaan khususnya kelembagaan masyarakat di tingkat Kecamatan dan Desa maka perlu sekali pengorganisasian yang baik, tepat dan dapat diterima masyarakat dan pihak terkait.

Organisasi yang terbentuk harus mampu melibatkan berbagai unsur yang diharapkan dapat mendukung program PEMP agar dapat berkesinambungan termasuk teknis pengelolaan dana bergulir.

Berdasar hasil musyawarah bersama dan mengacu pada pedoman umum, maka struktur organisasi pelaksanaan program PEMP di Kecamatan dan Desa dapat dilihat pada gambar ilustrasi 3 sebagai berikut :



Keterangan : ————— = garis komando - - - - - = garis pembinaan
 ————— = garis koordinasi / kerjasama

Sumber : Pedoman Umum Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun 2001.

Ilustrasi 3. Struktur Organisasi Program PEMP Tingkat Kecamatan dan Desa

4.5.1.4. Pembentukan Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP)

Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) adalah sekelompok orang yang secara sosial tinggal di Desa dan secara ekonomi mengandalkan pendapatannya dari kegiatan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir.

Dalam persiapan program PEMP, maka keberadaan Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) ini penting untuk meningkatkan hubungan sesama anggota serta saling mengisi dan mengawasi dalam pemanfaatan bantuan maupun ketaatan dalam pengembalian bantuan untuk dapat digulirkan kepada anggota lainnya.

Menurut jenis usahanya, maka Kelompok Masyarakat Pemanfaat yang mendapat bantuan terdiri dari pedagang ikan, petani tambak dan nelayan.

4.5.2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan peran Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) sangat penting.

Melalui fasilitasi Konsultan Manajemen Kabupaten, Tenaga Pendamping Desa (TPD), Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat, maka kelompok masyarakat pemanfaat akan menetapkan usulan kegiatan, mengikuti proses kegiatan terpilih, mengikuti perkembangan kegiatan usaha anggota, mengikuti perkembangan perguliran dana.

4.5.2.1. Tahap Penyusunan Rencana Kegiatan

Dalam upaya memanfaatkan rencana kegiatan, maka penyusunan rencana kegiatan dilakukan Konsultan

Manajemen Kabupaten berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten melalui tahapan, yaitu:

- Inventarisasi data, baik bersifat primer dan sekunder dan dilaksanakan serentak bersama kegiatan sosialisasi.
- Klasifikasi data primer dan data sekunder untuk mengetahui kesiapan kelembagaan yang sudah ada dan atau kesiapan pembentukan kelembagaan penunjang.

4.5.2.2. Tahapan Penentuan Kegiatan

Proses penentuan kegiatan didasarkan pada kegiatan masyarakat yang selama ini telah berlangsung, terutama pada subjek kegiatan kelompok masyarakat yang secara intensif telah berkembang dan terkait pemanfaatan sumberdaya laut secara langsung yaitu : nelayan namun mengingat aspek kepastian perguliran perlu dipertimbangkan, maka muncul kegiatan kelompok pedagang ikan dan petani tambak. Dari penentuan kegiatan terpilih, selanjutnya masing masing kelompok menyiapkan usulan kebutuhan untuk dapat di biayai dari program PEMP. Seleksi dan verifikasi dilakukan oleh KMP dan TPD sendiri bersama Mitra Desa, selanjutnya realisasi kegiatan dilakukan KMP masing-masing Desa.

Realisasi pinjaman untuk kebutuhan KMP untuk program PEMP tahun 2001 dapat dilihat pada tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10 : Realisasi Pinjaman Kebutuhan KMP Kabupaten Pati tahun 2001.

No	Desa	KMP	Jumlah Pinjaman		Keterangan	Realisasi
			(Rupiah)	(%)		
1.	Banyutowo	Lancar Jaya	263.500.000	49,95	Nelayan Nelayan Nelayan Tambak Pedagang ikan	4-01-2002
		Tengiri Jaya	54.000.000			
		Sumber Jaya	54.000.000			
		Tani Makmur	51.500.000			
		Mina Langgeng	50.000.000			
2.	Kenanti	KMP Nelayan	191.000.000	29,68		4-01-2002
		KMP Bakul	101.000.000			
		KMP Tambak	30.000.000			
3.	Bakalan	KMP Nelayan	189.000.000	29,37		3-01-2002
		KMP Bakul	85.000.000			
		KMP Nelayan	20.000.000			
Jumlah			643.500.000	100,00		

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, 2003.

Dari tabel 10 tersebut di atas terlihat, bahwa Desa Banyutowo dengan 5 (lima) KMP mendapat alokasi dana tersebar yaitu Rp. 263.500.000,- (40,95%), Desa Kenanti dengan 3 (tiga) KMP mendapat alokasi dana Rp. 191.000.000 (29,68%) dan Desa Bakalan dengan 3 (tiga) KMP mendapat alokasi dana Rp. 189.000.000,- (29,37 %).

Selanjutnya dilihat dari Kelompok Masyarakat Pemanfaatannya (KMP), maka jumlah bantuan dana per masing-masing KMP dapat dilihat pada tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 11 : Jumlah bantuan dana per masing – masing KMP.

No	Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP)	Jumlah KMP	Jumlah bantuan dana (Rp.)	%
1.	Nelayan	6	432.000.000	67,13
2.	Petani tambak	2	111.500.000	17,33
3.	Pedagang ikan	3	100.000.000	15,54
Jumlah		11	643.500.000	100,00

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, 2003.

Dari tabel 11 tersebut di atas terlihat KMP nelayan mendapat alokasi dana terbesar yaitu : Rp. 432.000.000,- (67,13%), KMP Petani tambak Rp. 111.500.000,- (17,33%) dan KMP pedagang ikan Rp. 100.000.000,- (15,54%).

4.5.3. Tahap Pembinaan

Untuk lebih meningkatkan pembinaan dalam melangsungkan kegiatan program PEMP , maka bantuan yang telah diberikan kepada KMP perlu dikembalikan dengan pola perguliran.

Sesuai kesepakatan berdasar hasil musyawarah bersama anggota KMP, maka Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang telah diterima anggota telah disepakati yaitu :

- Bantuan modal sifatnya bergulir.
- Pinjaman dikembalikan secara diangsur setiap bulan kecuali usaha tambak yang diangsur setiap 4 (empat) bulan.
- Jasa pinjaman adalah 1,5 % dari besarnya bantuan.

Meskipun besarnya jasa pinjaman dari masing-masing Desa besarnya sama yaitu 1,5%, tetapi dalam penggunaan masing-masing Desa berbeda.

- Desa Bakalan, dari jasa pinjaman 1,5% dipergunakan :

Dana pengembangan = 30 %

Jasa untuk KMP = 30 %

- | | |
|-----------------------|---------|
| Jasa untuk Mitra Desa | = 10 % |
| Jasa untuk LEPPM3 | = 10 % |
| Dana sosial | = 5 % |
| Administrasi | = 15 %. |
- Desa Kenanti, dari jasa pinjaman 1,5 % dipergunakan :

Dana pengembangan	= 30 %
Jasa untuk KMP	= 30 %
Jasa untuk Mitra Desa	= 10 %
Jasa untuk LEPP M3	= 10 %
Dana sosial	= 5 %
Administrasi	= 15 %
 - Desa Banyutowo, dari jasa pinjaman 1,5 % dipergunakan :

Dana pengembangan	= 25 %
Jasa untuk KMP	= 35 %
Jasa untuk Mitra Desa	= 20 %
Jasa untuk LEPPM3	= 10 %
Dana sosial	= 5 %
Administrasi	= 5 %.

4.5.4. Tahap pengawasan

Dalam kegiatan pengawasan oleh masyarakat, maka KMP bersama mitra desa diharapkan dapat berperan dalam pengawasan kegiatan terutama kegiatan pengembalian bantuan selain itu anggota KMP lainnya yang termasuk daftar tunggu mengingatkan penerima bantuan agar tertib mengembalikan pinjaman.

4.5.5. Pembentukan Pengurus LEPPM3 dan Mitra Desa

- **Pembentukan Pengurus LEPPM3**

LEPPM3 adalah singkatan dari Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir (LEPP) " Mikro Mitra Mina " (M3) yaitu

Lembaga Ekonomi yang akan dibentuk dengan wilayah kerjanya meliputi 1(satu) Kecamatan atau lebih yang mengkoordinasikan dan menyatukan KMP Desa.

Proses pembentukan organisasi LEPPM3 difasilitasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten, KM Kabupaten dan Camat. Anggota LEPPM3 terdiri dari KMP-KMP Desa dan orang profesional sebagai karyawan struktur organisasi LEPPM3 terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang dipilih dari perwakilan KMP Desa.

LEPPM3 mempunyai tugas yaitu :

- Menerima dan menyalurkan dana ekonomi produktif masyarakat.
- Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan program PEMP.
- Membukukan penggunaan dana PEMP.
- Melaporkan perkembangan kegiatan program PEMP kepada penanggungjawab operasional PEMP Kabupaten termasuk pengembalian dana PEMP.
- Membantu penyelesaian KMP bermasalah.
- Melakukan pemeriksaan pembukuan KMP.
- Berperan sebagai tim verifikasi bagi usulan usaha ekonomi produktif masyarakat dan pembentukan KMP baru.
- Mengembangkan kegiatan usaha yang dapat mendukung kegiatan usaha KMP Desa.
- Melakukan identifikasi potensi dan mengembangkan kemitraan sebagai dasar perencanaan strategis jangka pendek, menengah dan panjang.
- Berperan mengelola dana pengembangan modal usaha pasca kegiatan PEMP tahun 2001 dan menyalurkan kepada KMP-KMP baru.

Pembentukan LEPPM3 dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2001 bertempat di BP LKMD Kecamatan Dukuhseti dan di hadiri: Camat Dukuhseti, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten , Konsultan Manajemen Kabupaten, Muspika, Kepala Desa , lokasi program PEMP, wakil / Calon pengurus LEPPM3.

Susunan pengurus terpilih selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Nomor 050/800, tanggal 19 Nopember 2001.

- **Pembentukan Mitra Desa**

Mitra Desa adalah kelembagaan tingkat Desa yang terdiri dari aparat desa, tokoh masyarakat dan petugas teknis perikanan.

Pengurus Mitra Desa terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berasal dari Desa bersangkutan dan mempunyai perhatian terhadap pembangunan wilayahnya.

Pengurus Mitra Desa dari masing-masing Desa lokasi program PEMP ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa yaitu:

- Pengurus Mitra Desa Kenanti, SK Kepala Desa Kenanti Nomor 523.1/135/K/XI/2001 tanggal 5 Nopember 2001.
- Pengurus Mitra Desa Bakalan, SK Kepala Desa Bakalan Nomor 523.1/191/2001 tanggal 5 Nopember 2001.
- Pengurus Mitra Desa Banyutowo, SK Kepala Desa Nomor 474.2/196/2001 tanggal 31 Oktober 2001.

4.5.6. Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) dan Tenaga Pendamping Desa (TPD)

- **Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK)**

Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) berfungsi membantu pelaksana program PEMP di Kabupaten.

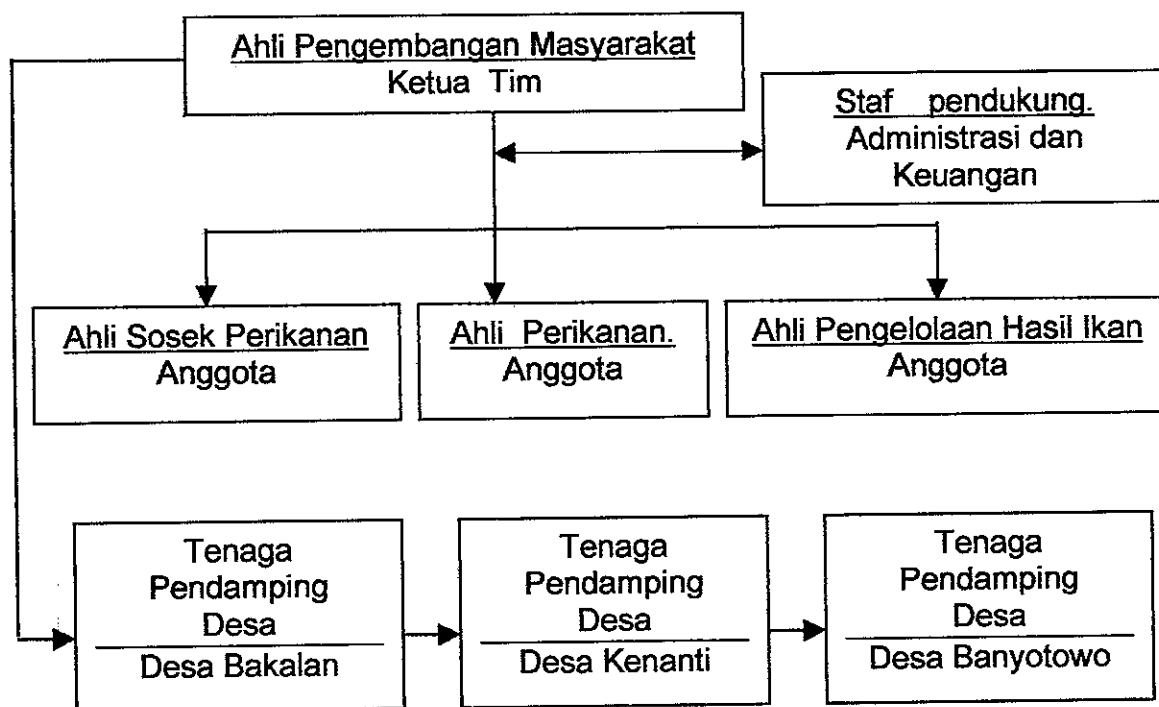
Pemilihan KMK berdasarkan pada kriteria :

- * Mempunyai komitmen dalam pengembangan masyarakat.
- * Berpengalaman dalam pekerjaan pemberdayaan masyarakat.
- * Mampu menyusun konsep pasca program PEMP 2001.
- * Diutamakan konsultan dari Perguruan Tinggi / LSM / Yayasan.

Tugas Konsultan Manajemen Kabupaten yaitu :

- * Membantu dan memfasilitasi pelaksanaan program PEMP di daerah, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan.
 - * Merekrut dan memfasilitasi Tenaga Pendamping Desa (TPD).
 - Bersama TPD melaksanakan kegiatan :
 - * Identifikasi dan Inventarisasi potensi dan permasalahan.
 - * Analisis data dan penyusunan program ekonomi, program sosial, program lingkungan dan infra struktur.
 - * Sosialisasi program PEMP.
 - * Implementasi program.
 - Melakukan pendampingan dan pembinaan kegiatan usaha KMP.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi serta pengembangan program.
- **Tenaga Pendamping Desa (TPD)**
- Tenaga Pendampingan Desa (TPD) merupakan Staf Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) yang ahli dalam bidang pengembangan Masyarakat dan berfungsi sebagai pendamping KMP dan Mitra Desa.
- Pada tahap pelaksanaan, TPD berfungsi sebagai pemberi bimbingan usaha, bimbingan teknis, sosial ekonomi, administrasi keuangan dan pengembangan KMP.

TPD bertindak sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator KMP. Dalam pelaksanaan pelaksanaan program PEMP tahun 2001 di Kabupaten Pati, Konsultan Manajemen Kabupaten dan Tenaga Pendamping Desa yang ditunjuk yaitu : Yayasan GERPA dengan alamat Jl. Dr.Susanto No.88 Pati.



Ilustrasi 4. Struktur Organisasi Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK).

4.6. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Responden dalam penelitian ini sebanyak 60 orang, terdiri dari nelayan sebanyak 32 orang, Petani tambak 17 orang, dan pedagang ikan 11 orang yang tersebar di 3(tiga) Desa yaitu Desa Bakalan, Desa Kenanti dan Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti.

Partisipasi yang diwujudkan melalui peran serta masyarakat penerima bantuan dalam ikut mensukseskan program PEMP menurut tingkat partisipasinya dibedakan : tinggi, sedang dan rendah.

Sesuai tujuan program PEMP, maka partisipasi masyarakat diharapkan dapat terwujud mulai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan.

Dari hasil penelitian terhadap responden di 3(tiga) Desa tersebut dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakatnya sebagai berikut :

4.6.1 Tahap Perencanaan

Tahap ini bertujuan pembentukan Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) dan sosialisasi program PEMP kepada masyarakat calon penerima bantuan.

Dalam kegiatan pembentukan pengurus KMP yang diawali pertemuan di 3(tiga) Balai Desa, kehadiran masing-masing kelompok dapat diketahui bahwa dari 3(tiga) KMP (nelayan, petani tambak dan pedagang ikan) maka : KMP aktif hadir adalah pedagang ikan 45,46%, petani tambak 41,18% dan nelayan 18,75%. KMP kadang-kadang hadir petani tambak 41,18%, nelayan 37,50% dan pedagang ikan 18,18%. KMP yang tidak pernah hadir nelayan 43,75%, pedagang ikan 36,36% dan petani tambak 17,64%. Dalam proses pembentukan pengurus kelompok maka : paling aktif

berperan dan terlibat langsung yaitu : petani tambak 35,29%, pedagang ikan 27,27% dan nelayan 12,50%. Tidak terlibat langsung : pedagang ikan 63,64%, nelayan 62,50% dan petani tambak 41,18%. Sama sekali tidak terlibat yaitu : nelayan 25%, petani tambak 23,53% dan pedagang ikan 9,09%. Terhadap hasil pembentukan pengurus kelompok, maka tingkat partisipasi masyarakat dapat dijelaskan pada tabel 12 sebagai berikut.

Tabel 12 : Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Pengurus Kelompok

No.	Kelompok	Jumlah Respon Den	%	Tingkat Partisipasi					
				Rendah		Sedang		Tinggi	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.	Nelayan	32	100	8	25,00	6	18,75	18	56,25
2.	Petani tambak	17	100	1	5,88	4	23,53	12	70,59
3.	Pedagang ikan	11	100	-	-	2	18,18	9	81,82
Jumlah		60	100	9	15,00	12	20,00	39	65,00

Keterangan : Jml = Jumlah.

Sumber : Analisis Data Primer.

Dari tabel 12 di atas dapat diketahui, bahwa :

- * Tingkat partisipasi tinggi yang ditunjukkan dengan pemahaman bahwa hasil pembentukan pengurus kelompok sudah merupakan hasil kesepakatan bersama, adalah pandangan dari kelompok pedagang ikan 81,82%, petani tambak 70,59% dan nelayan 56,25%.
- * Tingkat partisipasi sedang, karena menganggap bahwa pembentukan pengurus kelompok masih ada campurtangan petugas / aparat desa yaitu : pandangan dari petani tambak 23,53 %, nelayan 18,75% dan pedagang ikan 18,18%.
- * Tingkat partisipasi rendah, karena masyarakat menganggap tidak merasa berkepentingan dan tidak mempermasalahkan

pengurus kelompok yang terbentuk, pandangan ini disampaikan nelayan 25% dan petani tambak 5,88%.

Sosialisasi Program

Dalam sosialisasi program PEMP, yang dilaksanakan di 3(tiga) Balai Desa kehadiran masing-masing kelompok dapat dijelaskan :

- Yang selalu hadir yaitu pedagang ikan 63,64%, petani tambak 41,18% dan nelayan 21,87 %.
- Kadang-kadang hadir nelayan 53,13%, petani tambak 41,18% dan pedagang ikan 27,27 %.
- Yang tidak pernah hadir : nelayan 25 %, petani tambak 17,64 % dan pedagang ikan 9,09 %.

Pemahaman masyarakat terhadap materi sosialisasi dapat dikelompokkan menurut tingkat pemahamannya, yaitu :

- * Langsung mengetahui materi sosialisasi terutama dari KMP pedagang ikan 63,64 %, petani tambak 52,94 % dan nelayan 37,50 %.
- * Tidak langsung mengetahui dari KMP nelayan 40,63 %, petani tambak 29,41 % dan pedagang ikan 27,27 %.
- * Sama sekali tidak tahu, terutama KMP nelayan 21,87 %, petani tambak 17,65 % dan pedagang ikan 9,09 %.

Program PEMP yang salah satu tujuannya adalah peningkatan pendapatan masyarakat pesisir, maka harapan masyarakat terhadap program ini, dapat di jelaskan :

- Program akan bermanfaat, terutama harapan dari pedagang ikan 81,82 %, petani tambak 76,48 % dan nelayan 62,50 %.
- Masih ragu – ragu program akan bermanfaat terutama pandangan dari nelayan 15,63 %, petani tambak 11,76 % dan pedagang ikan 9,09 %.

Pada kegiatan sosialisasi program, tingkat partisipasi masyarakat dapat diketahui dari keberanian untuk bertanya, mengemukakan pendapat atas rencana program dan persiapan yang perlu dilakukan masyarakat calon penerima bantuan.

Tingkat partisipasi tersebut dapat dilihat pada tabel 13 sebagai berikut :

Tabel 13 : Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Sosialisasi Program PEMP.

No.	Kelompok	Jumlah Respon Den	%	Tingkat Partisipasi					
				Rendah		Sedang		Tinggi	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.	Nelayan	32	100	15	46,87	15	46,87	2	6,26
2.	Petani tambak	17	100	9	52,94	5	29,41	3	17,65
3.	Pedagang ikan	11	100	6	54,55	5	45,45	-	-
Jumlah		60	100	30	50,00	25	41,67	5	8,33

Keterangan : Jml = Jumlah.

Sumber : Analisis Data Primer.

Dari tabel 13 di atas dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam sosialisasi dapat dibedakan:

- Tinggi yaitu berani bertanya, terutama dari petani tambak 17,65% dan nelayan 6,26 %.
- Sedang yaitu kadang – kadang bertanya, terutama dari nelayan 46,87 %, pedagang ikan 45,45 % dan petani tambak 29,41 %.
- Rendah yaitu sama sekali tidak bertanya terutama dari pedagang ikan 54,55 %, petani tambak 52,94 % dan nelayan 46,87 %.

4.6.2 Tahap pelaksanaan

Tahapan ini bertujuan untuk menggali gagasan, penyusunan usulan kegiatan, penentuan kegiatan terpilih dan pencairan dana.

Kegiatan penggalan gagasan, kegiatan ini dilaksanakan melalui pertemuan yang dihadiri KMP yaitu :

- Selalu hadir terutama dari petani tambak 41,18%, pedagang ikan 18,18 % dan nelayan 12,50 %.
- Kadang – kadang hadir dari petani tambak 29,41 %, pedagang ikan 27,27 % dan nelayan 25,00 %.
- Tidak hadir, dari nelayan 62,50 %, pedagang ikan 54,55 % dan petani tambak 29,41 %.

Penggalan gagasan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada KMP untuk menyampaikan prioritas kebutuhan yang dapat diusulkan dalam program PEMP, selain itu penggalan gagasan juga membahas masukan dari KMP untuk kegiatan berikutnya maupun kesiapan pengembangannya.

Terhadap gagasan yang disampaikan masyarakat, dapat diketahui yaitu :

- Gagasan diterima, dari petani tambak 23,53 %, pedagang ikan 18,18 % dan nelayan 12,50 %.
- Gagasan hanya dipertimbangkan, dari pedagang ikan 27,27%, nelayan 18,75 % dan petani tambak 17,65 %.

Pada kegiatan penggalan gagasan ini, tingkat partisipasi masyarakat dapat diketahui dari keberanian untuk mengajukan gagasan dan menyampaikan pendapat rencana kegiatan berikutnya .

Tingkat partisipasi masyarakat dalam penggalan gagasan dapat dijelaskan pada tabel 14 sebagai berikut :

Tabel 14 : Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penggalan Gagasan

No.	Kelompok	Jumlah Responden	%	Tingkat Partisipasi					
				Rendah		Sedang		Tinggi	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.	Nelayan	32	100	22	68,75	8	25,00	2	6,25
2.	Petani tambak	17	100	10	58,82	4	23,53	3	17,65
3.	Pedagang ikan	11	100	6	54,55	5	45,45	-	-
Jumlah		60	100	38	63,33	17	28,33	5	8,34

Keterangan : Jml = Jumlah.

Sumber : Analisis Data Primer.

Dari tabel 14 di atas dapat diketahui, bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penggalan gagasan dapat dijelaskan :

- Tinggi yaitu aktif menyampaikan gagasan, terutama dari petani tambak 17,65 % dan nelayan 6,25 %.
- Sedang yaitu kadang – kadang menyampaikan gagasan, dari pedagang ikan 45,45 %, nelayan 25,00 % dan petani tambak 23,53 %.
- Rendah yaitu tidak menyampaikan gagasan, dari nelayan 68,75 %, petani tambak 58,82 % dan pedagang ikan 54,55 %.

Kegiatan penyusunan usulan kegiatan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pertemuan dengan kehadiran KMP, yaitu :

- Selalu hadir, dari petani tambak 41,18%, pedagang ikan 41,18% dan nelayan 12,50 %.
- Kadang-kadang hadir, dari nelayan 50,00 %, pedagang ikan 36,36 % dan petani tambak 35,29 %.
- Tidak pernah hadir, dari nelayan 37,50%, pedagang ikan 36,36% dan petani tambak 23,53 %.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan usulan kegiatan diperlihatkan pada sikap kepuasan masyarakat atas usulan yang

disampaikan sesuai kebutuhannya. Untuk mengetahui partisipasi ini dapat dilihat pada tabel 15 sebagai berikut :

Tabel 15 : Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Usulan Kegiatan

No.	Kelompok	Jumlah Respon Den	%	Tingkat Partisipasi					
				Rendah		Sedang		Tinggi	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.	Nelayan	32	100	4	12,50	15	46,87	13	40,63
2.	Petani tambak	17	100	-	-	6	35,29	11	64,71
3.	Pedagang ikan	11	100	-	-	4	36,36	7	63,64
Jumlah		60	100	4	6,67	25	41,66	31	51,67

Keterangan : Jml = Jumlah.

Sumber : Analisis Data Primer.

Dari tabel 15 di atas terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan usulan kegiatan, yaitu :

- Tinggi yaitu merasa puas karena usulan sesuai kebutuhan dapat diterima, terutama dari petani tambak 64,71 %, pedagang ikan 63,64% dan nelayan 40,63 %.
- Sedang yaitu merasa puas karena mengikuti usulan teman-temannya, terutama dari nelayan 46,87 %, pedagang ikan 36,36% dan petani tambak 35,29 %.
- Rendah yaitu menyerahkan sepenuhnya kepada petugas, terutama dari nelayan 12,50 %.

Kegiatan penentuan kegiatan terpilih, mengingat bahwa usulan kegiatan yang disampaikan KMP ternyata melebihi pinjaman yang disediakan, maka perlu dilakukan penyesuaian untuk menentukan kegiatan terpilih.

Penyesuaian dan penentuan kegiatan terpilih dilakukan secara musyawarah bersama KMP dalam rapat pertemuan dengan hasil, yaitu :

- Kegiatan terpilih masih sesuai kebutuhan terutama dari petani tambak 76,48 %, nelayan 68,75 % dan pedagang ikan 45,45 %.
- Kegiatan terpilih belum sesuai kebutuhan terutama dari pedagang ikan 45,45 %, nelayan 25,00 % dan petani tambak 11,76 %.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam penentuan kegiatan terpilih dapat di jelaskan pada tabel 16 sebagai berikut :

Tabel 16 : Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Kegiatan Terpilih

No.	Kelompok	Jumlah Respon Den	%	Tingkat Partisipasi					
				Rendah		Sedang		Tinggi	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.	Nelayan	32	100	4	12,50	27	84,37	1	3,13
2.	Petani tambak	17	100	3	17,65	10	58,82	4	23,53
3.	Pedagang ikan	11	100	2	18,18	7	63,64	2	18,18
Jumlah		60	100	9	15,00	44	73,33	7	11,67

Keterangan : Jml = Jumlah.

Sumber : Analisis Data Primer.

Dari tabel 16 di atas dapat di jelaskan bahwa Tingkat partisipasi masyarakat dalam Penentuan Kegiatan Terpilih dapat di lihat pada kepuasannya atas perbaikan usulan yang disampaikan, yaitu :

- Tinggi yaitu merasa puas, karena penentuan kegiatan terpilih kesemuanya ditentukan masyarakat tanpa ada campur tangan pihak lain dengan hasil yaitu : petani tambak 23,53 %, pedagang ikan 18,18% dan nelayan 3,13 %.
- Sedang yaitu merasa puas dengan menyerahkan kepada petugas terutama dari nelayan 84,37 %, pedagang ikan 63,64 % dan petani tambak 58,82 %.

- Rendah yaitu menganggap bahwa kegiatan terpilih sudah di tentukan petugas terutama dari pedagang ikan 18,18 %, petani tambak 17,65 % dan nelayan 12,50 %.

Kegiatan pencairan dana. Setelah penentuan kegiatan terpilih berdasarkan hasil musyawarah di sepakati dan telah disusun rencana kerjanya, maka langkah selanjutnya adalah kegiatan pencairan dana.

Dalam persiapan pencairan dana dan setelah dicermati ternyata masih di jumpai kekeliruan yang harus diperbaiki.

Pada kegiatan perbaikan ini dapat dilihat tingkat partisipasi pada tabel 17 sebagai berikut :

Tabel 17 : Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perbaikan Rencana Kerja

No.	Kelompok	Jumlah Respon Den	%	Tingkat Partisipasi					
				Rendah		Sedang		Tinggi	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.	Nelayan	32	100	4	12,50	17	53,13	11	34,37
2.	Petani tambak	17	100	1	5,88	6	35,29	10	58,83
3.	Pedagang ikan	11	100	1	9,10	5	45,45	5	45,45
Jumlah		60	100	6	10,00	28	46,66	26	43,34

Keterangan : Jml = Jumlah.

Sumber : Analisis Data Primer.

Dari tabel 17 di atas dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat, dapat dibedakan :

- Tinggi, karena masyarakat memperbaiki rencana kerja tanpa campur tangan petugas, terutama dari petani tambak 58,83%, pedagang ikan 45,45 % dan nelayan 34,37 %.
- Sedang, karena rencana kerja sesuai arahan petugas, terutama nelayan 53,13 %, pedagang ikan 45,45 % dan petani tambak 35,29%.

- Rendah, perbaikan rencana kerja sepenuhnya diserahkan petugas terutama dari nelayan 12,50%, pedagang ikan 9,19% dan petani tambak 5,88 %.

Setelah KMP mengetahui dana dapat terrealisir, maka muncul beberapa pandangan yaitu :

- Dana masih sesuai kebutuhan, terutama dari petani tambak 52,94%, pedagang ikan 36,36% dan nelayan 34,38 %.
- Menganggap dana yang cair hanya bersifat pemerataan terutama dari pedagang ikan 36,36%, nelayan 31,25% dan petani tambak 29,41%.
- Menganggap dana yang cair sudah tidak sesuai kebutuhan, terutama dari nelayan 34,37 %, pedagang ikan 27,28 % dan petani tambak 17,65%.

Demikian pula dalam hal penggunaan dana, maka :

- Dana yang ada disesuaikan kebutuhan terutama pedagang ikan 81,82%, petani tambak 70,59% dan nelayan 43,76%.
- Melaksanakan sebagian rencana kerja terutama dari nelayan 28,12%, pedagang ikan 18,18% dan petani tambak 17,65%.
- Dana tidak digunakan sesuai rencana kerja terutama dari nelayan 28,12% dan petani tambak 11,76%.

4.6.3 Tahap Pengawasan

Tahap ini dimaksud agar masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan program PEMP sehingga memungkinkan program dapat berjalan dan berkelanjutan.

Pengawasan dilakukan baik terhadap orang lain maupun dirinya sendiri terutama dalam pengembalian pinjaman.

- Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi orang lain dapat dijelaskan :

- * Keberanian untuk langsung menyampaikan teguran apabila terjadi penyimpangan, yaitu : petani tambak 64,70 %, nelayan 62,50 % dan pedagang ikan 54,55 %.
- * Tidak berani menyampaikan teguran, yaitu petani tambak 17,65 %, nelayan 12,50% dan pedagang ikan 9,09 %.
- * Diam dan membiarkan, yaitu pedagang ikan 36,36 %, nelayan 25,00 % dan petani tambak 17,65 %.
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengembalikan pinjaman dapat dijelaskan :
 - * Mengembalikan pinjaman dengan mengangsur secara teratur terutama dari pedagang ikan 63,64 %, petani tambak 58,83 % dan nelayan 3,12 %.
 - * Mengembalikan pinjaman dengan mengangsur, tetapi tidak teratur / kadang – kadang macat terutama dari nelayan 56,25 %, Petani tambak 29,41 % dan pedagang ikan 18,18 %.
 - * Pengembalian pinjaman macat atau tidak bisa mengembalikan pinjaman terutama dari nelayan 40,63%, pedagang ikan 18,18% dan petani tambak 11,76%.

Terkait dengan macatnya pengembalian bantuan, hal ini disebabkan hasil produksi / tangkapan menurun, maupun sepihya pasar, adanya kebutuhan keluarga yang mendesak (biaya sekolah dan pengobatan), serta macat yang dibiarkan dan tidak ada sangsi serta mengikuti teman-temannya yang macat.

Untuk dapat menunjang kelangsungan program PEMP masyarakat penerima bantuan memandang perlu ada jasa pinjaman yang diharapkan dapat untuk operasional lembaga desa, tabungan kesejahteraan anggota dan dana pengembangan yang telah ditetapkan sebesar 1,5 % dari besarnya pinjaman, maka pandangan masyarakat yaitu :

- Menganggap Jasa pinjaman harus ada terutama dari pedagang ikan 100%, nelayan 96,88% dan petani tambak 70,59%.
- Menganggap jasa pinjaman dinilai masih terlalu besar terutama dari petani tambak 23,53% dan nelayan 3,12%.
- Menganggap tidak perlu ada jasa pinjaman terutama dari petani tambak 5,88%.

4.7. Tingkat Partisipasi.

Berdasarkan indikator yang telah ditentukan pada setiap tahapan kegiatan, yaitu : tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan, maka tingkat partisipasi dari masing – masing kelompok masyarakat pemanfaat dapat di lihat pada tabel 18 sebagai berikut :

Tabel 18 : Tingkat Partisipasi Kelompok Masyarakat Pemanfaat Menurut Jenis Pekerjaan Pada Setiap Tahapan Kegiatan.

No	Kelompok	Responden		Tahap Persiapan					
				Rendah		Sedang		Tinggi	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.	Nelayan	32	100	2	6,25	16	50,00	14	43,75
2.	Petani tambak	17	100	-	-	5	23,41	12	70,59
3.	Pedagang ikan	11	100	-	-	3	27,27	8	72,73
Jumlah		60	100	2	3,33	24	40,00	34	56,67
No	Kelompok	Responden		Tahap Pelaksanaan					
				Rendah		Sedang		Tinggi	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.	Nelayan	32	100	-	-	26	81,25	6	18,75
2.	Petani tambak	17	100	-	-	9	52,94	8	47,06
3.	Pedagang ikan	11	100	-	-	7	63,64	4	36,36
Jumlah		60	100	-	-	42	70,00	18	30,00

Lanjutan :

No	Kelompok	Responden		Tahap Pengawasan					
				Rendah		Sedang		Tinggi	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.	Nelayan	32	100	-	-	11	34,37	21	65,63
2.	Petani tambak	17	100	-	-	4	23,53	13	76,47
3.	Pedagang ikan	11	100	-	-	3	27,27	8	72,73
Jumlah		60	100	-	-	18	30,00	42	70,00

Keterangan : Jml = Jumlah.

Sumber : Analisis Data Primer.

Dari tabel 18 di atas dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi nelayan, petani tambak dan pedagang ikan pada masing – masing tahapan kegiatan sangat beragam, yaitu :

- **Pada tahapan persiapan.**

Sebagian besar (56,67%) menunjukkan tingkat partisipasi tinggi terutama dari pedagang ikan (72,73%), petani tambak (70,59%) dan nelayan (43,75%). Sebagian lainnya (40,00%) menunjukkan tingkat partisipasi sedang, terutama dari nelayan (50,00%), pedagang ikan (27,27%) dan petani tambak (23,41%). Hanya sebagian kecil (3,33%) yang partisipasinya rendah terutama dari nelayan (6,25%).

Pada tahapan persiapan ini dengan kegiatan utamanya meliputi pembentukan KMP dan Sosialisasi program, maka tingkat partisipasi dari responden dapat diketahui dari tingkat kehadiran dalam setiap pertemuan, aktifitas dan peran serta dalam pembentukan KMP serta pemahaman dan pandangan atas rencana program PEMP yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Bagi responden yang tingkat partisipasinya tinggi, umumnya adalah mereka yang mampu berpikir realistis, ingin maju, mempunyai sikap menghormati pihak – pihak yang

mengundang serta mengharapkan program PEMP dapat bermanfaat bagi dirinya.

- **Pada Tahap Pelaksanaan**

Sebagian besar (70,00%) menunjukkan tingkat partisipasi sedang terutama dari nelayan (81,25%), pedagang ikan (63,64%) dan petani tambak (52,94%). Sebagian lain (30,00%) menunjukkan tingkat partisipasi tinggi terutama dari petani tambak (47,06%), pedagang ikan (36,36%) dan nelayan (18,75%).

Pada tahap pelaksanaan ini kegiatan utamanya meliputi : penggalan gagasan, penyusunan usulan kegiatan terpilih dan pencairan dana, sehingga diperlukan kemampuan seseorang untuk berpikir realistis dan keberanian untuk menyampaikan gagasan serta menentukan kegiatan sesuai kebutuhannya.

Pada tahap ini sebagian besar responden tingkat partisipasinya sedang, karena dari mereka beranggapan bahwa program PEMP adalah program pemerintah yang kegiatannya telah ditentukan, sehingga dalam penentuan rencana kegiatan mereka lebih banyak mengikuti teman – temannya maupun menyerahkan sepenuhnya kepada petugas pendamping.

- **Pada Tahap Pengawasan**

Sebagian besar (70,00%) menunjukkan tingkat partisipasi tinggi, terutama dari petani tambak (76,47%), pedagang ikan (72,73%) dan nelayan (65,63%). Sebagian lainnya (30,00%) menunjukkan tingkat partisipasi sedang terutama dari nelayan (34,37%), pedagang ikan (27,27%) dan petani tambak (23,53%).

Pada tahap pengawasan ini kegiatan yang diperlukan adalah peningkatan pengawasan masyarakat apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program serta peningkatan

tanggung jawab responden untuk mengembalikan pinjaman dengan cara mengangsur, sehingga diharapkan dana yang kembali ini dapat diberikan responden lainnya yang masuk daftar tunggu agar program dapat berkelanjutan.

Dalam peningkatan pengawasan apabila terjadi penyimpangan, sebagian besar responden menyatakan keberaniannya untuk menegur dan mengingatkan apabila terjadi penyimpangan, namun dalam pelaksanaan program PEMP ini ternyata tidak dijumpai penyimpangan terutama penyimpangan dari petugas dan aparat.

Dalam peningkatan tanggung jawab responden untuk mengembalikan pinjaman dengan cara mengangsur maka kelompok pedagang ikan dan petani tambak adalah kelompok yang paling rajin mengangsur, sedangkan kelompok nelayan awalnya rajin mengangsur tetapi dengan alasan mengalami paceklik akibat pengaruh musim barat, maka angsuran mulai tersendat dan bahkan macat.

Kemacatan pengembalian angsuran dari kelompok nelayan sebenarnya diawali dari sebagian kecil anggota, namun berhubung tidak adanya sanksi maka anggota lainnya ikut – ikutan tidak mengangsur. Kondisi ini mempengaruhi juga kelompok lainnya (pedagang ikan dan petani tambak) untuk ikut – ikutan tidak mengangsur.

Selanjutnya secara keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PEMP dapat dilihat pada tabel 19 sebagai berikut :

Tabel 19 : Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program PEMP

No.	Kelompok	Jumlah Responden	%	Tingkat Partisipasi					
				Rendah		Sedang		Tinggi	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.	Nelayan	32	100	-	-	21	65,63	11	34,37
2.	Petani tambak	17	100	-	-	5	29,41	12	70,59
3.	Pedagang ikan	11	100	-	-	5	45,45	6	54,55
Jumlah		60	100	-	-	31	51,67	29	48,33

Keterangan : Jml = Jumlah.

Sumber : Analisis Data Primer.

Dari tabel 19 di atas dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PEMP sebanyak 51,67%, termasuk sedang yaitu : dari nelayan 65,63%, pedagang ikan 45,45% dan petani tambak 29,41%, serta sebanyak 48,33% termasuk tinggi yaitu : dari petani tambak 70,59%, pedagang ikan 54,55% dan nelayan 34,37 %.

4.8. Pengujian Data Hasil Penelitian

4.8.1. Uji Asumsi Klasik

Agar persamaan regresi linier berganda sebagai alat analisis data dalam penelitian ini dapat dipergunakan maka perlu uji asumsi klasik yaitu :

4.8.1.1. Uji Multikolinieritas.

Berdasarkan hasil analisis data nilai tolerance dan *variance inflation factor (VIF)* dapat dilihat pada tabel 20 sebagai berikut:

Tabel 20 : Hasil Analisis Regresi Uji Multikolinieritas.

Variabel	Nilai <i>Tolerance</i>	Nilai <i>Variance Inflation Factor</i> (VIF)
X ₁	0,8630	1,159
X ₂	0,8210	1,218
X ₃	0,8780	1,138
X ₄	0,8300	1,205

Sumber : Analisis Data Primer.

Dari tabel 20 tersebut di atas dapat dilihat bahwa nilai *variance inflation factor* (VIF) masih dibawah 10 (sepuluh), hal ini berarti bahwa dalam persamaan regresi berganda tidak terdapat variabel yang mempunyai persoalan multikolinieritas.

4.8.1.2. Uji Autokorelasi.

Berdasar hasil analisis diketahui dari $N = 60$ (enam puluh) dengan $k = 4$ (empat), maka nilai $dL = 1,44$ dan $du = 1,73$ sedangkan nilai *Durbin Watson* yang diperoleh adalah $d = 2,298$, selanjutnya dari hasil uji statistik d (lampiran 6 : Uji Autokorelasi) dapat diketahui bahwa posisi *Durbin Watson* berada mendekati nilai 2 sehingga menurut Gujarati (1995), menunjukkan bahwa persamaan regresi bebas autokorelasi.

4.8.2. Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PEMP, berdasar hasil perhitungan regresi berganda dengan menggunakan *SPSS for Windows* dapat dilihat pada tabel 21 sebagai berikut :

Tabel 21 : Hasil analisis Regresi Tingkat Partisipasi Masyarakat.

Keterangan	Koefisien β	t hitung	Prob.Sig
Intersep	20,769	7,492	0,000
X1(pendidikan formal)	0,935	4,380	0,000
X2(jumlah tanggungan keluarga)	3,056	5,486	0,000
X3(pendapatan keluarga).	6,834E-06	3,802	0,000
X4(jenis pekerjaan)	- 0,932	- 0,682	0,498
R	0,816		
R ² (<i>Square</i>)	0,667		
<i>Adjusted R Square</i>	0,642		
F hitung	27,496		
<i>Prob.Sig.</i>	0,0000		

Keterangan : Hasil Regresi lihat lampiran 5
Prob.Sig = Probability Significance

Berdasar hasil analisis regresi diatas, maka persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 20,769 + 0,935X_1 + 3,056X_2 + 6,834.10^{-6} X_3 - 0,932 X_4$$

Hasil analisis regresi di atas menunjukkan 3 (tiga) koefisien ($X_1, X_2,$ dan X_3) menunjukkan tanda positif dan 1 (satu) koefisien (X_4) menunjukkan tanda negatif dengan signifikan pada tingkat kesalahan (α) = 5%.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai $R^2 = 0,667$ atau 66,70%, maka dapat diketahui bahwa pengaruh yang diberikan variabel X_1, X_2, X_3 , dan X_4 , secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel Y adalah sebesar 66,70%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 33,30% merupakan pengaruh variabel lain selain variabel X_1, X_2, X_3 , dan X_4 .

Hasil uji regresi variabel X_1, X_2, X_3 dan X_4 terhadap variabel Y menghasilkan nilai F hitung sebesar 27,496, karena nilai F hitung ini dengan tingkat signifikansi mendekati 0 (prob.sig = 0,000), maka dapat disimpulkan bahwa variabel X_1, X_2, X_3 dan X_4 secara simultan (bersama-sama) dapat mempengaruhi variabel Y artinya bahwa perubahan nilai variabel bebas (X) dapat menjelaskan variasi perubahan nilai variabel tetap (Y).

Untuk mengetahui hubungan variabel tetap (yang dijelaskan) dan variabel bebas (yang menjelaskan) serta diasumsikan dalam penelitian ini ke 2 (dua) variabel tersebut mempunyai hubungan garis linier berganda, maka dalam perhitungannya dilakukan pengujian koefisien regresi (uji parsial) yaitu memastikan apakah variabel bebas (X_1, X_2, X_3 dan X_4) yang terdapat dalam persamaan tersebut di atas secara individu berpengaruh terhadap nilai variabel tetap (Y) dengan melakukan uji t pada $\alpha = 5\%$.

Pengujian dilakukan secara individu (parsial) dari masing-masing pengaruh variabel bebas (X_1, X_2, X_3 dan X_4) terhadap variabel tetap (Y) dengan melihat tingkat signifikansinya (*probability significance*) untuk masing-masing t hitung sebagai berikut :

- 1). Pendidikan formal (X_1), uji t variabel X_1 ini menghasilkan nilai t hitung sebesar 4,380 karena nilai t hitung dengan tingkat signifikansi mendekati 0 (Prob.Sig 0,000) maka dapat disimpulkan bahwa secara individu (parsial) variabel X_1 dapat mempengaruhi variabel Y .

Lamanya pendidikan formal mempunyai pengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang dapat memberikan kontribusi penting terhadap tingkat partisipasi masyarakat.

Tingkat partisipasi masyarakat dapat selalu dikaitkan dengan pendidikan, sebab seseorang yang mempunyai kesempatan memperoleh pendidikan lebih tinggi, akan semakin mudah memahami tentang program yang akan dibicarakan di daerahnya, sehingga akan mempengaruhi tingkat partisipasinya.

- 2). Tanggungan Keluarga (X_2), uji t variabel X_2 ini menghasilkan nilai t hitung sebesar 5,486 karena nilai t hitung dengan tingkat signifikansi mendekati 0 (Prob.Sig 0,000) maka dapat disimpulkan bahwa secara individu (parsial) variabel X_2 ini dapat mempengaruhi variabel Y.

Tanggungan keluarga mempunyai pengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi, hal ini menunjukkan bahwa tanggungan keluarga merupakan beban berat bagi kepala keluarga untuk mampu memenuhi kebutuhan keluarganya selama pendapatannya belum dapat meningkat.

Masyarakat sangat berharap bahwa program PEMP sesuai tujuannya dapat meningkatkan pendapatan, sehingga beban keluarga dapat dikurangi.

- 3). Pendapatan keluarga (X_3), uji t variabel X_3 ini menghasilkan nilai t hitung sebesar 3,802 karena nilai t hitung dengan tingkat signifikansi mendekati 0 (Prob.Sig. 0,000) maka dapat disimpulkan bahwa secara individu (parsial) variabel X_3 ini dapat mempengaruhi variabel Y.

Jumlah pendapatan keluarga mempunyai pengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi, hal ini menunjukkan bahwa

semakin besar pendapatan seseorang semakin tinggi tingkat partisipasinya.

Pendapatan sangat di pengaruhi oleh kemampuan seseorang untuk memperoleh pendapatan. Kemampuan ini dapat berupa keahlian yang dimiliki, ketekunan dan hubungan dengan berbagai pihak. Demikian pula dengan adanya program PEMP ini, maka bagi masyarakat yang pendapatannya tinggi, semakin tinggi pula tingkat partisipasinya.

- 4). Jenis pekerjaan (X_4). Uji t variabel X_4 ini menghasilkan nilai t hitung sebesar $-0,682$ karena t hitung tingkat signifikansinya tidak mendekati 0 (Prob.Sig 0,498) maka dapat disimpulkan bahwa secara individu (parsial) variabel X_4 ini tidak mempengaruhi variabel Y.

Jenis pekerjaan yang ditekuni responden pada umumnya bersifat turun temurun, dan berdasarkan pengalaman.

Masyarakat setempat beranggapan bahwa pekerjaan yang ditekuni selama ini, meskipun perlu ketrampilan dan keahlian, tetapi mereka tetap merasa bahwa ketrampilan dan keahlian tersebut dapat diperoleh dari pengalaman, sehingga masyarakat kurang memahami bahwa ada pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat dilakukan secara profesional.

4.9. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi

Berdasarkan pandangan dari beberapa peneliti sebelumnya, bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap suatu program pembangunan sangat di pengaruhi beberapa faktor keadaan lingkungan masyarakat baik bersifat internal maupun eksternal.

Faktor keadaan lingkungan masyarakat secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

- 1) Keadaan sosial ekonomi, seperti : umur, pendidikan, pendapatan, kelembagaan, kepemimpinan, ketrampilan dan tingkat kemiskinan yang ditunjukkan dengan beban tanggung jawab keluarganya.
- 2) Keadaan budaya, seperti : norma, tradisi dan adat istiadat.
- 3) Kegiatan program pemerintah, seperti : peningkatan ketrampilan, penyelenggaraan kegiatan penyuluhan serta pengaturan dan pelayanan pemerintah.
- 4) Keadaan alam / lingkungan sekitarnya, seperti : keberadaan sumber daya alam dan profesionalisme masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam.

Selanjutnya dalam penelitian ini di pilih beberapa indikator yang diperkirakan dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PEMP di Kabupaten Pati yaitu : pendidikan formal, tanggungan keluarga dan pendapatan yang diharapkan dapat memberi gambaran keadaan sosial ekonomi masyarakat, serta profesionalisme masyarakat atas jenis pekerjaan dalam pemanfaatan sumberdaya alam sekitarnya sebagai faktor pengaruh lingkungan.

Dari hasil pengujian terhadap 60 (enam puluh) sampel dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PEMP di Kabupaten Pati sangat di pengaruhi oleh faktor pendidikan formal, jumlah tanggungan keluarga dan pendapatan keluarga, sedangkan faktor lain profesionalisme atas jenis pekerjaan dalam pemanfaatan sumberdaya alam sekitarnya ternyata tidak mempengaruhi tingkat partisipasi.

4.9.1. Pendidikan Formal

Tingkat pendidikan formal yang diukur dengan berdasarkan hasil analisis uji t terbukti menunjukkan bahwa

variabel pendidikan formal ini ternyata dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat secara signifikan dengan taraf nyata sebesar 0,000.

Tingkat pendidikan menurut pandangan Madrie (1986), mampu membentuk kepribadian seseorang untuk lebih dapat memahami pelaksanaan suatu program yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tingkat partisipasi nyata.

Demikian pula menurut pandangan Soeryani.M (1987), bahwa dengan pendidikan formal maka seseorang dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan sehingga muncul sikap tanggung jawab dan keinginan maupun cita-cita sesuai pengetahuan yang dikuasainya.

Tingkat partisipasi dapat selalu dikaitkan dengan pendidikan, sebab diharapkan dengan semakin tingginya pendidikan, maka semakin mudah pula seseorang untuk memahami program yang akan diberikan di daerahnya dengan memberikan dukungan dalam bentuk partisipasi nyata.

4.9.2. Pendapatan Keluarga

Pendapatan keluarga yang dipengaruhi dari pendapatan usaha pokok, berdasarkan hasil analisis uji t terbukti menunjukkan bahwa variabel pendapatan ternyata dapat mempengaruhi tingkat partisipasi secara signifikan dengan taraf nyata sebesar 0,000.

Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjani.M (1987), bahwa tingkat pendapatan yang dapat mempengaruhi pula tingkat partisipasi seseorang, demikian pula menurut pandangan Slamet.S (1985) maupun Sastroputro (1988) yang memasukkan unsur pendapatan keluarga sebagai gambaran keadaan sosial ekonomi seseorang, ini merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi.

Pendapatan keluarga sebagai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi seseorang, selain dapat ditentukan besaran jumlah juga sangat ditentukan rutin atau tidak rutin pendapatan tersebut dapat diperoleh.

Petani tambak dan pedagang ikan sebagai kelompok yang ekonominya sudah mapan cenderung tingkat partisipasinya lebih tinggi bila dibandingkan dengan kelompok nelayan, karena kelompok nelayan meskipun kadang-kadang memperoleh pendapatan lebih besar, namun suatu saat bisa tidak memperoleh pendapatan terutama pada saat musim paceklik (musim barat).

4.9.3. Tanggungan Keluarga

Tanggungan keluarga berupa jumlah jiwa yang ditanggung kepala keluarga, berdasarkan hasil analisis uji t, terbukti secara signifikan dengan taraf nyata sebesar 0,000 ada hubungan dengan tingkat partisipasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjani.M (1987), yang mengkaitkan bahwa jumlah pendapatan dengan beban keluarga adalah indikator kemiskinan yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa dengan beban tanggung jawab keluarga yang semakin besar maka dapat mempengaruhi tingkat partisipasi, artinya seseorang semakin bertanggungjawab untuk memenuhi kewajiban, terutama untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tanggungan keluarga mempunyai pengaruh terhadap tingkat partisipasi, hal ini disebabkan bahwa masyarakat setempat memandang keberadaan keluarga merupakan karunia yang wajib disyukuri. Menurut masyarakat setempat yang hidup dengan segala keterbatasan, keberadaan keluarga sebenarnya adalah potensi

yang memungkinkan seluruh keluarga dapat memanfaatkan potensi sumberdaya alam untuk memberikan tambahan pendapatan keluarga. Sehingga program PEMP sebagai program pemberdayaan masyarakat maupun potensi sumberdaya di wilayahnya menjadi daya tarik masyarakat untuk mensukseskannya.

4.9.4. Jenis Pekerjaan

Profesionalisme jenis pekerjaan adalah keadaan yang harus dipahami masyarakat pesisir, dalam upaya pemanfaatan sumberdaya laut, nelayan seharusnya lebih profesional dibanding pekerjaan lainnya seperti misalnya petani tambak dan pedagang ikan, namun umumnya masyarakat nelayan sendiri belum bisa memahami hal ini.

Dari hasil analisis uji t ternyata jenis pekerjaan tidak signifikan ($\text{Prob.Sig} = 0,498$) dapat mempengaruhi tingkat partisipasi.

Berkembangnya teknologi baru yang relatif cepat, khususnya di bidang perikanan baik pada usaha penangkapan maupun usaha budidaya, seharusnya diikuti pelaku usaha untuk terus menerus meningkatkan berbagai teknologi tersebut secara maksimal dan profesional.

Penguasaan teknologi baru melalui berbagai pengetahuan praktis akan memungkinkan masyarakat dapat meningkatkan produktivitas usahanya.

Pandangan atas profesionalisme jenis pekerjaan belum banyak dipahami masyarakat.

Tidak terbuktinya hubungan antara variabel ini dengan tingkat partisipasi, disebabkan masyarakat memandang bahwa kegiatan yang ditekuninya selama ini bersifat turun temurun dan di peroleh berdasarkan pengalaman.

Masyarakat sebenarnya menyadari bahwa ketrampilan yang dikuasai masih relatif terbatas, namun karena belum adanya kesempatan untuk memperoleh ketrampilan, maka mereka memandang bahwa ketrampilan tersebut menjadi tidak penting untuk dapat meningkatkan produktivitas usahanya.

4.10. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program PEMP

Dari penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa pelaksanaan program PEMP tahun 2001 di Kabupaten Pati dapat terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukkan bahwa tahapan kegiatan telah berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan ketentuan lainnya telah dipenuhi sesuai dengan Pedoman Umum PEMP. Beberapa hasil yang telah dicapai antara lain dalam penentuan lokasi dan pemilihan kelompok sasaran dapat berjalan baik dan tidak menimbulkan gejolak masyarakat. Demikian pula beberapa kegiatan seperti pembentukan Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP), perekrutan Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) dan Tim Pendamping Desa (TPD), kegiatan sosialisasi program PEMP diberbagai tingkatan, fasilitasi pendampingan masyarakat serta koordinasi dalam rangka pemantapan program PEMP bersama seluruh jajaran terkait dengan baik.

Pelaksanaan program PEMP di Kabupaten Pati meskipun telah berjalan dengan baik, namun ada beberapa hal yang dalam pelaksanaannya perlu mendapat perhatian sebagai upaya perbaikan pelaksanaan program PEMP dimasa mendatang.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

4.10.1. Kegiatan Pemilihan Lokasi

Kabupaten Pati yang terbagi menjadi 21 (dua puluh satu) Wilayah Kecamatan terdapat 9 (sembilan) Kecamatan yang wilayahnya berbasis pesisir dan laut. Mengingat alokasi dana PEMP tahun 2001 terbatas, maka perlu penetapan prioritas lokasi dan terpilih 1 (satu) Kecamatan yaitu Kecamatan Dukuhseti meliputi 3 (tiga) Desa yaitu Desa Kenanti, Desa Bakalan dan Desa Banyutowo.

Untuk menghindari terjadinya gejolak dan ketidak puasan masyarakat dalam pemilihan lokasi, maka pihak Konsultan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati perlu melakukan inventarisasi potensi dan permasalahan wilayah. Inventarisasi potensi dan permasalahan wilayah selain memerlukan kecermatan dalam pendataan juga memerlukan waktu. Waktu pelaksanaan program PEMP yang sangat singkat hanya 3 (tiga) bulan termasuk kegiatan pemilihan lokasi menjadikan pelaksanaan program PEMP menjadi tidak efisien dan efektif. Untuk itu kedepan mestinya setiap wilayah harus mempunyai basis data potensi karakteristik wilayah dan berbagai informasi yang menyangkut kewilayahan dan kondisi penduduk yang selanjutnya di tuangkan dalam kebijakan pembangunan perwilayahan, sehingga setiap program seperti PEMP yang mempunyai tujuan dan sasaran spesifik dan jelas, maka dalam pemilihan lokasi tidak lagi perlu waktu lama.

4.10.2. Kondisi Masyarakat

Ada anggapan masyarakat bahwa bantuan langsung masyarakat diperuntukkan bukan hanya pada kegiatan berbasis kelautan dan pesisir, tetapi semua lapisan masyarakat berhak menerima bantuan program PEMP.

Melalui proses sosialisasi akhirnya masyarakat dapat memahami bahwa bantuan langsung masyarakat pada awal akan diprioritaskan kepada masyarakat yang karena kondisi ekonominya benar-benar membutuhkan. Selanjutnya atas kesepakatan bersama masyarakat lainnya dapat memanfaatkan bantuan langsung masyarakat atas hasil perguliran sesuai dengan daftar tunggu.

Dalam proses penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagian besar kelompok mengusulkan bantuan langsung masyarakat melebihi dana program PEMP yang tersedia sehingga kondisi ini menyulitkan dan menghambat proses pencairan dana bantuan. Mencermati hal tersebut, maka KMK dan TPD melalui proses pendampingan bersama masyarakat menyusun kembali RDKK dengan melakukan analisis usaha untuk masing-masing jenis usaha kelompok sehingga dihasilkan kebutuhan pembiayaan yang realitis dan logis.

Untuk menjaga keberlanjutan program PEMP, pada awalnya telah disepakati bersama bahwa bantuan langsung masyarakat yang diterima perlu dikembalikan dengan cara mengangsur, yaitu untuk nelayan dan pedagang ikan selama 12 (dua belas) bulan dan petani

tambak 4 (empat) bulan sekali selama 12 (dua belas) bulan. Dalam proses pengembalian angsuran, pada awalnya sangat lancar, terutama pada saat masih ada pendampingan dari KMK dan TPD, namun begitu KMK dan TPD selesai melaksanakan tugas kontraknya pengembalian angsuran menjadi tersendat. KMP terutama dari KMP nelayan dengan berbagai alasan, utamanya alasan adanya musim barat yang tidak memungkinkan mereka menangkap ikan, mulai berhenti mengangsur dan karena tidak ada sangsi maupun teguran maka pengembalian angsuran berhenti sama sekali. Sebaliknya kelompok pedagang ikan dan petani tambak adalah kelompok yang aktif mengangsur namun setelah mengetahui KMP nelayan berhenti mengangsur dan tidak mendapat sangsi maupun teguran maka kelompok pedagang ikan dan petani tambak yang angsurannya hampir lunas mengikuti KMP nelayan untuk berhenti mengangsur.

Hal menarik peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program PEMP, pada umumnya masyarakat lebih takut dan tunduk apabila diingatkan teman-temannya lebih-lebih apabila yang mengingatkan adalah tokoh masyarakat.

Program PEMP dikondisikan seolah olah adalah program pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk kewajiban pemerintah kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya yang pencairan dana tergantung dari KMK dan TPD, bahkan ada kesan di masyarakat bahwa bantuan program PEMP adalah bantuan cuma-cuma dari KMK. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tidak mempunyai kewenangan

mengatur pemanfaatan bantuan, sehingga fungsi dinas hanya lebih bersifat membantu pelayanan administrasi, demikian pula peran tokoh masyarakat dan aparat desa sebagai mitra desa meskipun telah dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Desa tetapi banyak yang tidak mengetahui fungsi dan tugasnya.

4.10.3. Aspek Kelembagaan

Sesuai pedoman umum pelaksanaan program PEMP agar pelaksanaan program dapat berkelanjutan, maka perlu dibentuk lembaga yang mengkoordinasikan dan menyatukan KMP desa yaitu Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir " Mikro Mitra Mina " yang disingkat LEPPM3. Struktur organisasi LEPPM3 terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara yang dipilih dari perwakilan KMP desa. Untuk menunjang operasional LEPPM3 sesuai kesepakatan bersama diberikan 10% dana operasional dari jasa pinjaman 1,5 %.

Awalnya LEPPM3 di bentuk sebagai wadah untuk mengelola bantuan langsung masyarakat dan dapat berjalan baik selama ada pendampingan dari KMK dan TPD, namun karena pengurusnya kurang profesional dan lebih-lebih anggotanya tidak taat pada kewajibannya, maka operasional LEPPM3 mengalami hambatan. Pengurus LEPPM3 mengalami kendala teknis dan administrasi dalam menjalankan lembaga, lebih-lebih pada saat pengembalian angsuran tersendat dan sudah tidak ada lagi pendampingan KMK dan TPD, maka kegiatan lembaga ikut tersendat dan bahkan berhenti.

Mitra Desa sebagai lembaga yang pengurusnya terdiri dari aparat desa, tokoh masyarakat dan petugas teknis perikanan yang keberadaannya ditetapkan berdasar Surat Keputusan Kepala Desa masing-masing, ternyata juga tidak dapat berbuat banyak dalam rangka menunjang keberlanjutan program. Hal ini terjadi karena Mitra Desa yang di bentuk hanya bersifat melegalkan susunan pengurus, tetapi pengurus tidak jelas fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sebagai Mitra Desa. Operasionalisasi Mitra Desa yang ditunjang dari jasa pinjaman 1,5% antara Mitra Desa berbeda. Mitra Desa Kenanti dan Desa Bakalan sebesar 10% sedangkan Mitra Desa Banyutowo 20%. Seperti halnya LEPPM3, kegiatan Mitra Desa juga terbambat dan tidak dapat berbuat banyak atas macatnya pengembalian angsuran dari masyarakat.

Berdasar hasil pengamatan di lapangan terlihat bahwa pembentukan kelembagaan ditingkat desa seperti LEPPM3 dan Mitra Desa, ternyata hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan pedoman umum program PEMP dan tidak atau kurang memperhatikan kondisi masyarakat lokalnya. Suatu kelembagaan di tingkat lokal dapat berjalan efektif apabila lembaga telah dipersiapkan jauh sebelumnya dan dikelola secara profesional sehingga tidak bisa dipersiapkan secara mendadak. Di desa penelitian sebenarnya sudah ada lembaga sosial ekonomi masyarakat yang dikelola oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membantu kesulitan ekonomi masyarakat. Lembaga ini sudah berjalan sangat efektif karena dikelola tokoh-tokoh yang disegani masyarakat. Pembentukan LEPPM3 seharusnya tidak perlu dilakukan,

tetapi cukup dilakukan melalui suatu kerjasama dengan memberikan mandat, tugas dan kewenangan kepada lembaga sosial ekonomi di desa tersebut untuk melaksanakan fungsi-fungsi LEPPM3, selanjutnya apabila fungsi LEPPM3 sudah dapat berjalan efektif bisa dilepas agar mandiri.

Mitra Desa bisa tetap dibentuk tetapi harus diikuti fungsi, tugas dan kewenangan jelas yang memungkinkan lembaga ini dapat berjalan sebagai fungsi kontrol.

4.10.4. Konsultasi Manajemen Kabupaten (KMK) dan Tim Pendamping Desa (TPD)

Keberadaan KMK dan TPD di masyarakat, dipandang sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk mencairkan bantuan langsung masyarakat. Dominasi KMK dan TPD sangat menonjol dibanding peran Dinas, Aparat Kecamatan dan Aparat Desa, hal ini menjadikan kondisi kurang baik, karena masyarakat menjadi lebih taat dan tunduk kepada apa yang diperintahkan KMK dan TPD. Sesuai kontrak, KMK dan TPD hanya melakukan pendampingan selama 3 (tiga) bulan dengan salah satu tugasnya adalah menyiapkan masyarakat dan manajemen LEPPM3 agar dapat tetap berjalan setelah program berakhir secara berkelanjutan. Sebagai bentuk tanggungjawab atas pelaksanaan program PEMP, maka KMK dan TPD meskipun telah selesai masa kontrak 3 (tiga) bulan, tetap melanjutkan kegiatan monitoring dan bimbingan untuk membantu pemerintah selama 4 (empat) bulan dengan biaya sendiri. Selama kurun waktu perpanjangan pendampingan KMK

dan TPD, kegiatan pasca program terlihat berjalan masih efektif, pengembalian angsuran lancar dan laporan keuangan maupun pengelolaan perputaran bantuan juga lancar. Tetapi setelah tidak ada lagi pendampingan KMK dan TPD, pengembalian angsuran mulai tersendat dan laporan tidak tertib serta bahkan ada yang menyatakan dengan berbagai alasan sudah tidak sanggup lagi mengembalikan bantuan.

Mencermati hal demikian, mestinya perekrutan KMK dan TPD sebagai pendamping masyarakat perlu dilakukan dengan lebih memprioritaskan perekrutan tenaga profesional lokal (setempat) dan tidak sekedar tenaga yang memenuhi ketentuan persyaratan teknis administrasi.

Perekrutan tenaga profesional lokal terutama yang tinggal di desa setempat, diharapkan dapat berperan aktif mengikuti perkembangan masyarakat dan kelembagaan binaannya sebagai bentuk tanggungjawab.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan :

1. Program PEMP tahun 2001 di biayai dari APBN sebesar Rp.643.500.000,- dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang telah di salurkan kepada anggota KMP sebanyak 550 orang, sedangkan sisanya sebanyak 506 orang di persiapkan sebagai penerima hasil pengguliran.
2. Tahapan pelaksanaan program PEMP secara teknis telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan telah berjalan sesuai jadwal terutama dalam pelaksanaan kegiatan utama yaitu : penentuan lokasi, identifikasi potensi, penyusunan organisasi baik tingkat birokrasi, masyarakat (LEPP M3, KMP dan Mitra Desa) dan pendamping (Konsultan Manajemen Kabupaten dan Tim Pendamping Desa), Sosialisasi, dan pendampingan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan / pengembangan serta pelaporan.
3. Tingkat partisipasi masyarakat sebagian besar (51,67%) termasuk tingkat sedang sehingga peran serta masyarakat hanya sekedar formalitas, ada kesediaan untuk mendengar dan memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat tetapi mereka masih menerima meskipun suara dan pendapatnya tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Tingkat partisipasi sedang ini berturut – turut di jumpai pada : nelayan 65,63%, pedagang ikan 45,45% dan petani tambak 29,41%
4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan hubungan variabel yang

berfungsi sebagai variabel yang dijelaskan yaitu Y (sebagai variabel tetap) dan variabel yang berfungsi menjelaskan yaitu X (sebagai variabel bebas), maka hubungan kedua variabel diasumsikan mempunyai hubungan garis linier berganda.

Dari hasil analisis regresi dapat diketahui :

a. Persamaan Regresi yang di peroleh yaitu :

$$Y = 20,769 + 0,935X_1 + 3,056X_2 + 6,834.10^{-6} X_3 - 0,932 X_4$$

Hasil analisis regresi diatas menunjukkan 3 (tiga) koefisien variabel X (X_1 = pendidikan formal, X_2 = tanggungan keluarga dan X_3 = pendapatan) menunjukkan tanda positif dan hasil uji t menunjukkan hubungan nyata, hal ini berarti semakin tinggi nilai variabel X_1, X_2 dan X_3 akan semakin tinggi pula nilai partisipasinya. Sedangkan variabel X_4 yaitu jenis pekerjaan, meskipun nilai koefisien regresinya di peroleh hasil negatif, namun menurut uji t variabel ini tidak ada hubungan nyata, hal ini berarti variabel jenis pekerjaan tidal mempengaruhi partisipasi .

- b. Secara simultan (bersama-sama) pengaruh variabel X_1, X_2, X_3 dan X_4 terhadap variabel Y yang menghasilkan nilai F hitung = 27,496 karena nilai F hitung dengan tingkat signifikan mendekati 0 (Prob.Sig. = 0,000), maka dapat disimpulkan bahwa variabel X_1, X_2, X_3 dan X_4 secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y sebesar 66,70% ($R^2=0,667$), sedangkan sisanya sebesar 33,30% merupakan pengaruh variabel lain selain variabel X_1, X_2, X_3 dan X_4 .
- c. Secara parsial (individu), hasil pengujian koefisien regresi terhadap variabel bebas X_1, X_2, X_3 dan X_4 dengan melakukan uji t pada $\alpha = 5\%$, dapat disimpulkan bahwa :
- Variabel X_1 , pendidikan formal menghasilkan nilai t hitung = 4,380 karena nilai t hitung dengan tingkat signifikan

mendekati 0 (Prob.Sig. = 0,000) berarti secara individu variabel pendidikan formal dapat mempengaruhi tingkat partisipasi.

- Variabel X_2 , tanggungan keluarga menghasilkan t hitung = 5,486 karena nilai t hitung dengan tingkat signifikan mendekati 0 (Prob.Sig. = 0,000) berarti secara individu variabel tanggungan keluarga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi.
 - Variabel X_3 , pendapatan keluarga menghasilkan t hitung = 3,802 karena nilai t hitung dengan tingkat signifikan mendekati 0 (Prob.Sig. = 0,000) berarti secara individu variabel pendapatan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi.
 - Variabel X_4 , jenis pekerjaan menghasilkan t hitung = - 0,682 karena nilai t hitung tidak signifikan mendekati 0 (Prob.Sig. = 0,498), hal ini berarti variabel jenis pekerjaan tidak dapat mempengaruhi tingkat partisipasi.
5. Keberhasilan program PEMP di Kabupaten Pati, keberlanjutannya mengalami hambatan, karena tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembalian pinjaman masih rendah, hal ini terlihat pinjaman macet pada nelayan mencapai 40,63%, pedagang ikan 18,18% dan petani tambak 11,76%. Serta semula rajin mengangsur tetapi kemudian macet yaitu : nelayan 56,25%, petani tambak 29,41% dan pedagang ikan 18,18%.

5.2. Saran – Saran

• Untuk Pemerintah

1. Dalam pelaksanaan program PEMP di jumpai permasalahan terutama pandangan masyarakat yang menganggap bantuan dari pemerintah merupakan bantuan cuma-cuma dan dalam hal

ada beberapa anggota pengembaliannya macet, ternyata tidak mendapat teguran / sanksi, maka banyak anggota lain ikut – ikut tidak mengembalikan pinjaman untuk itu pemilihan peserta harus selektif, yang melibatkan tokoh masyarakat / agama yang ada di desa.

2. Waktu penyiapan pelaksanaan program PEMP sangat terbatas, sehingga lembaga dan atau kelompok yang terbentuk hanya bersifat formalitas dan belum mampu untuk menyusun konsep dan strategi dalam pembangunannya sesuai situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dan jika perlu memanfaatkan lembaga lokal yang sudah ada dan aturannya sudah ditaati masyarakat.

- **Untuk Pendamping Masyarakat**

1. Warga penerima bantuan sebagai anggota masyarakat masih mempunyai kepercayaan terhadap ketokohan seseorang dan lembaga lokal terutama yang berbasis agama untuk itu lembaga lokal ini dapat dimanfaatkan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai LEPP M3.
2. Pendamping masyarakat perlu dilakukan tidak saja dalam tahun pelaksanaan program PEMP, namun juga setelah pasca program hingga masyarakat benar - benar mandiri.

- **Untuk Masyarakat**

1. Program PEMP merupakan program yang memberi kesempatan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan usaha dengan bantuan dana secara stimulan, tanpa agunan dan bunga. Untuk itu kesempatan ini mestinya dapat

dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan meningkatkan partisipasi dan menjaga kepercayaan kepada pemerintah.

2. Program PEMP yang diharapkan dapat berkelanjutan namun dengan tingginya tingkat kemacetan pengembalian dana, maka dapat menghambat upaya pengembangan kegiatan usaha calon penerima bantuan berikutnya sesuai daftar tunggu.

- **Untuk Dunia Pengetahuan**

Wilayah pesisir sebagai daerah peralihan ekosistem darat dan ekosistem laut sangat rentan terhadap perubahan bentang alam maupun kerusakan lingkungan akibat faktor alam dan faktor manusia. Untuk itu guna menjaga kelestarian lingkungan pesisir, maka partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan.

Ditengah masyarakat pesisir sebenarnya ada kondisi bahwa masyarakat pada umumnya tunduk dan taat pada norma adat peninggalan para leluhur, namun norma adat tersebut meskipun ada yang masih bertahan tetapi ada pula yang mulai dan bahkan sudah hilang.

Bagi dunia pengetahuan, penelitian-penelitian sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pesisir perlu terus ditingkatkan, hal ini karena masih banyak permasalahan wilayah pesisir yang tidak saja dapat ditangani secara teknis tetapi banyak yang perlu ditangani melalui pendekatan-pendekatan non teknis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar,A,1987, **Masalah Modal Dasar (*Human Capital*) dalam Hubungan Mengatasi Kesenjangan Gender dan Kebijakan Pemerataan Ekonomi, Makalah Acuan Penelitian *Human Capital***, Program Studi PWD PSS IPB Bogor.
- Asdak, 2001, **Pengelolaan Sumberdaya Alam Dalam Konteks Pengelolaan Daerah aliran Sungai**, Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Bappeda Propinsi Jawa Tengah - Lemlit UNDIP,2000. **Studi Pemberdayaan Potensi dan Rasionalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Laut di Propinsi Jawa Tengah**. Bappedal Prop.Jateng.Semarang.
- Bappeda Kabupaten Pati, 2003. **Pati Dalam Angka Tahun 2003**. Bappeda Kabupaten Pati, Pati.
- Chambers,R,1991. **Shortcut and Participatory Method For Gaining Social Information For Project, In Putting People First Ociological Variables ini Rural Development** . Oxford University Press, Oxford.
- Dahuri, R. 1996. **Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Secara Terpadu**. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP),2001. **Pedoman umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**, Jakarta.
- Dietriech.G.Bengen,2000. **Penentuan dan Pengelolaan Kawasan Lindung di Pesisir, Laut dan Pulau-Pulalu kecil**, di sampaikan dalam Lokakarya Pendekatan Penataan Ruang dalam Menunjang Pengembangan Wilayah Pesisir, Pantai dan Pulau-Pulau Kecil, Jakarta 10 Oktober 2000, Dirjen Pesisir,Pantai dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah,1999. **Program Peningkatan Eksport Hasil Perikanan Jawa Tengah 1987-2003**. Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah,Semarang.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah.2003. **Laporan Kinerja Sub Dinas Kelautan** . Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah,Semarang.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati, 2002. **Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati,Pati.

- Dipokusumo, B, 1999. **Analisis Pemberdayaan Masyarakat Pada Pemukiman Lahan Kering di Propinsi Nusa Tenggara Barat**. IPB, Bogor.
- Direktorat Jendral Perikanan, 1997, **Potensi Lahan Pengembangan Budidaya Pantai dan Lautan Indonesia**, Jakarta.
- Farouk Muhammad dan Djaali.2003. **Metodologi Penelitian Sosial**. PTIK, Press Jakarta.
- Gujarati Damodar, 1995. **Basic Econometric. 3rd Edition, Mc. Graw Hill, Inc.**
- Kartasasmita Ginanjar,1996. **Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan**. CIDES, Jakarta.
- Lena Ellitan, 2002. **Praktik – Pratik Pengelolaan Sumberdaya Manusia dan Keunggulan Kompetatif Berkelanjutan**. Majalah ilmiah Visi, Volume 10 no.1, Universitas HKBP Nommensen. Medan.
- Madrie,1986. **Beberapa Faktor Yang Berkelanjutan Dengan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan**. IPB, Bogor.
- Mubyarto, 1988. **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan**. Liberty, Yogyakarta.
- Mudjahirin Thohir, 1999. **Wacana Masyarakat dan Kebudayaan Jawa Pesisiran**. Penerbit Bendera. Semarang.
- Sastroputro, S, 1988. **Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan**. Alumni Bandung.
- Slamet, S,1985. **Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan**. Interaksi.No.1, Tahun I. Jakarta.
- Soeryani,M,1987. **Lingkungan Sumberdaya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan**. Editor Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudharto. P.Hadi.1999.**Manajemen Lingkungan Berbasis Kerakyatan dan Kemitraan, Pidato Pengukuhan Di Sajikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Manajemen Lingkungan dan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, 12 Oktober 1999**. Badan Penerbit Univertas Diponegoro Semarang.
- Sudharto.P.Hadi,1999. **Peran serta Masyarakat dan Keterbukaan informasi Dalam Proses AMDAL**. Disampaikan pada Seminar Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Amdal, diselenggarakan BAPEDAL di Jakarta, 3-4 Pebruari 1999.
- Syarif Hidayat dan Darwin Syamsulbahri, 2001. **Pemberdayaan Ekonomi Rakyat**. PT. Pustaka Quantum. Jakarta.

- Tampubolon Mangatas, 2002. **Problematik dan Prospek Pembangunan Masyarakat Desa Ditinjau Dari Segi Pendidikan Nonformal.** Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan nomor 039 tahun ke 8, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Victor.P.H. Nikijuluw, 2001 **Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Strategi Pemberdayaan Mereka Dalam Kontek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu,** Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. IPB Bogor.
- Wardojo, 1992. **Pendekatan Penyuluhan Pertanian Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyuluhan Pembangunan Di Indonesia Menyongsong Abad XXI,** A.V.S.Hubies, P.Tjitropranoto dan W. Ruwiyanto. Editor Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara. Jakarta.
- Wibowo, Rimun, 2003. **Program Partisipasi Pembangunan Masyarakat Desa (P3.PMD) Dalam Pembangunan Sektor Lingkungan.** Makalah Disampaikan Pada Acara Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dengan Pola PRA Diselenggarakan BAPEDAL Kabupaten Cilacap.
- Winoto, J, 1997. **Pedoman Perwilayahan Komoditas Pertanian.** Program Studi PWDPP. IPB. Bogor.